



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LKj 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PADANG, JANUARI 2022

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.



Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2022
Kepala Dinas Kehutanan

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas sepuluh yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera” dan Misi 5 Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka di tetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat
3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan 5 program, 17 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 114,86% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian Realisasi (%) | Kode |
|---|---|---|------------|-----------|-----------------------|------|
| 1. | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 | |
| | | Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | 85% | 94.29% | 110.93 | |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I | | | | | 105.46 | |
| 2. | Menurunnya laju kerusakan hutan | Persentase penurunan luas kerusakan hutan | 15% | 19.75% | 131.67 | |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II | | | | | 131.67 | |
| 3. | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21.21% | 25.12% | 118.43 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III | | | | | 118.43 | |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (80.00) | A (83.11) | 103.89 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV | | | | | 103.89 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV | | | | | 114.86 | |

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2021 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2021 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2021. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2021 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan” Tahun 2021 sebesar 105,46% diukur melalui capaian 2 (dua) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Menurunnya laju kerusakan hutan” Tahun 2021 sebesar 131,67% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat” Tahun 2021 sebesar 118,43% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola organisasi” Tahun 2021 sebesar 103,89% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2021 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100% dan tidak tepat waktu (terlambat), disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 2 |
| 1.4 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.5 Aspek Strategis | 7 |
| 1.6 Analisis Perkembangan Strategis..... | 9 |
| 1.6.1 Kondisi Saat Ini..... | 10 |
| 1.6.2 Kondisi yang Diharapkan..... | 13 |
| 1.7 Peningkatan Sistem AKIP dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 14 |
| 1.8 Sistematika Penyajian | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| 2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021..... | 18 |
| 2.2 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 | 19 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 24 |
| 2.4 Rencana Kinerja Sasaran | 25 |
| 2.5 Rencana Kinerja Kegiatan | 26 |
| 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2021 | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 33 |
| 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja | 33 |
| 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja | 34 |
| 3.3 Capaian Kinerja | 37 |
| 3.4 Realisasi Anggaran | 103 |
| BAB IV PENUTUP | 119 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... | iv |
| Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021 | 9 |
| Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016- 2021 | 24 |
| Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran | 25 |
| Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 | 28 |
| Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 | 28 |
| Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2021 | 29 |
| Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2021 | 34 |
| Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020..... | 34 |
| Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja | 37 |
| Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... | 38 |
| Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 | 41 |
| Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 dan Tahun 2020 | 42 |
| Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 | 44 |
| Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... | 45 |
| Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi..... | 45 |
| Tabel 17. Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2021 | 46 |
| Tabel 18. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat | 47 |
| Tabel 19. Capaian Target IKU Nilai PNBPN Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2021 | 54 |
| Tabel 20. Target dan Realisasi PNBPN Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2021 | 55 |

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 21. | Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2021..... | 57 |
| Tabel 22. | Pencapaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2021 | 62 |
| Tabel 23. | Perbandingan Capaian Kinerja Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2021 dan Tahun 2020 | 63 |
| Tabel 24. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 | 64 |
| Tabel 25. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 64 |
| Tabel 26. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi..... | 65 |
| Tabel 27. | Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2021 | 66 |
| Tabel 28. | Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2021 ... | 67 |
| Tabel 29. | Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5..... | 68 |
| Tabel 30. | Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2021 di Sumatera Barat | 69 |
| Tabel 31. | Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Menurunnya laju kerusakan hutan Tahun 2021 | 74 |
| Tabel 32. | Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2021 | 79 |
| Tabel 33. | Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2021 dan Tahun 2020..... | 80 |
| Tabel 34. | Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 | 81 |
| Tabel 35. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 81 |
| Tabel 36. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi | 82 |
| Tabel 37. | Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat per Triwulan Tahun 2021 | 83 |
| Tabel 38. | Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial | 84 |
| Tabel 39. | Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 | 92 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 40. | Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2021..... | 97 |
| Tabel 41. | Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020. | 97 |
| Tabel 42. | Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 | 98 |
| Tabel 43. | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi | 99 |
| Tabel 44. | Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja per Triwulan Tahun 2021..... | 101 |
| Tabel 45. | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Enam Tahun Terakhir | 102 |
| Tabel 46. | Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2021 | 104 |
| Tabel 47. | Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 107 |
| Tabel 48. | Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 124 |

DAFTAR GAMBAR

| | halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 7 |
| Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis I | 40 |
| Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2021 | 42 |
| Gambar 4. Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016-2021 | 43 |
| Gambar 5. Realisasi Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2021 | 43 |
| Gambar 6. Capaian kinerja Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2021 | 43 |
| Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3 | 61 |
| Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2021 | 63 |
| Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2021 | 63 |
| Gambar 10. Perbandingan Skenario Target Penurunan Laju Kerusakan Hutan dengan Laju Kerusakan Hutan yang terjadi (ha/tahun) | 68 |
| Gambar 11. Skenario dan Realisasi <i>Hotspot</i> Tahun 2015 – 2019 | 71 |
| Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3 | 79 |
| Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (%) Tahun 2016-2021 | 80 |
| Gambar 14. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (5) Tahun 2016-2019 | 81 |
| Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Sembilan Tahun Terakhir | 84 |
| Gambar 16. Perbandingan Luas Izin dan Luas Usulan skema Perhutanan Sosial | 85 |
| Gambar 17. Survey Karakteristik Petani Hutan Tahun 2021 | 88 |
| Gambar 18. Penyerahan Penghargaan Wana Lestari Tahun 2021 | 89 |
| Gambar 19. Pemberian Penghargaan Inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 90 |
| Gambar 20. Tujuan dan Sasaran Strategis 4 | 96 |
| Gambar 21. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2016 s.d Tahun 2020 | 98 |
| Gambar 22. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 | 98 |



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Lampiran 2. Penghargaan yang Diterima Tahun 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setiap Kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja pemerintah khususnya laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021. Ikhtisar perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai dari APBD maupun sumber dana lainnya.

Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu satu tahun tersebut merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan pembangunan Sumatera Barat dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja secara ringkas, lengkap dan terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya melalui pengungkapan



(*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan dari Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian laporan kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem,

- pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Unsur pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi, struktur dinas mengalami penambahan Eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Peraturan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas dijabat oleh Yozarwardi.UP, S.Hut, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Dr.Ferdinal Asmin,S.TP,MP yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Jefri Chandra, SP
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Nensi, SE.AK
 - c. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dijabat oleh (Plt.) Muhdian Prasetya D, S.Hut, M.Si
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dijabat oleh Nofrizal, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Kepala Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan dijabat oleh Mahmuddin, S.Hut

4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Bambang Suyono, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijabat oleh Zarmawandi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dijabat oleh Era Sulatri, S.Hut, M.Si
5. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, MP yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahary, S.IP
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - c. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijabat oleh Muhdian Prasetya.D, S.Hut, M.Si
6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dijabat oleh (Plt) Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan dijabat oleh Boy Martin, S.H, M.Si
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Almen, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan dijabat oleh Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh (Plt)Dr.Ferdinal Asmin,S.TP,MP yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Imran, SE
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Rini Hasmira, S.H
 - c. Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Mika Lestaria, S.Hut, M.Si
8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Kusworo, SP.M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazul Taufik, ST, M.Eng
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Zeptin Alex Vildiro, S.Hut, MM
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Cucu Sukarna, S.IP

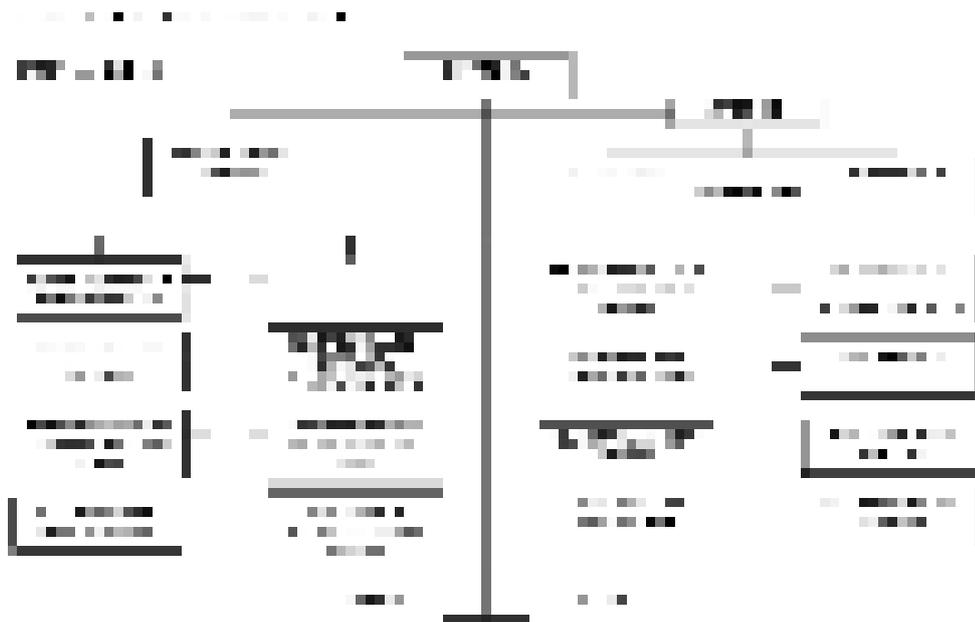


9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya yang dijabat oleh Yandesman, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Rizky Hamid Nasution, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Hendri Dunan, SH
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yuhan Sahri, S.Hut.
10. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota yang dijabat oleh Sayogo Hutomo, S.Hut, MSi yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Susi Erienti, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Ismet Fanani, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yogi Wandra, S.Hut
11. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Agam Raya yang dijabat oleh Ir. Afniwirman yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dewi Safnita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Yon Fredy, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Suhet Tarmizi, SP
12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung yang dijabat oleh Terra Dharma, S.Hut, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dian Yulia Widra, S.Hut.T
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Febri Syahli, S.Hut, M.Sc
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh (Plt) Dian Yulia Widra, S.Hut.T
13. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok yang dijabat oleh Ir. Refriasel yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Novi Eka Putri, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Bakhrinaldi, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh (Plt) Novi Eka Putri, S.Hut



14. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batang Hari yang dijabat oleh Hamdani, S.Sos yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Hasan, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Joni Saputra, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Muhammad Fitriadi, S.Hut
15. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan yang dijabat oleh Madrianto, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Yusfiandrita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Andre Das Gomes, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendrio Fadly, S.Hut
16. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya yang dijabat oleh Hendra Bakti, ST yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Ir. Evi Yusri, M.Si
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Habibullah, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Fetrinelfa, S.Hut
17. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai yang dijabat oleh (Plt) IR. Mgo Senatung, MP yang membawahi:
 - a. Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Zunaidi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Pribel Sirait, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Riza Nofa Satria, S.Hut, M.Si

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan penyiapan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah *hotspot* dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengamanan hutan, pencegahan dan penanganan *illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).



4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
5. Meningkatkan sumbangan pendapatan daerah dan PNBPD dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta ekspor melalui perbaikan perizinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan tata kelola organisasi dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan melaksanakan seluruh kegiatan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga merupakan upaya percepatan peningkatan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dan;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu **“Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”**.

Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud dilakukan melalui 5 Program yaitu:

1. Program Pengelolaan Hutan,
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,
3. Program Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan,
4. Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),
5. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.

| Misi | Prioritas | Tujuan | Sasaran Perubahan RPJMD | Sasaran Berdasarkan Rekomendasi Tim Penguatan Sakip Melalui Surat Keputusan Gubernur | Program |
|--|---|---|---|--|---|
| 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | 2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan dukungan dan daya tampung lingkungan | 3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan | 3. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | 1. Program Pengelolaan Hutan, 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, 3. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 4. Program Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). |

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitivitas kehutanan, penanganan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, melibatkan masyarakat

sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan.

Hal ini menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi

Kawasan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan seluas $\pm 2.286.883,10$ Ha (54,07%) dari luas wilayah $\pm 4.229.730,00$ Ha yang terdiri atas :

- ✓ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas $\pm 765.623,24$ Ha
- ✓ Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 775.304,94$ Ha
- ✓ Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas seluas $\pm 228.665,68$ Ha
- ✓ Hutan Produksi (HP) seluas $\pm 357.088,97$ Ha
- ✓ Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas $\pm 160.200,27$ Ha,
- ✓ Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 1.942.846,90$ Ha,

Melihat komposisi tersebut di atas, kawasan hutan Sumatera Barat didominasi oleh kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam dan hutan lindung yang terhampar di pinggang Bukit Barisan yang merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke provinsi tetangga (Jambi dan Riau), dengan kondisi fisik bertopografi sedang hingga berat, kontur bergelombang sebagai habitat berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan yang perlu dikembangkan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial juga dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah pemangkuan lahan (tenurial) yang banyak terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan kegiatan pembangunan lainnya di luar bidang kehutanan juga menambah kompleksitas masalah tenurial di Sumatera Barat. Di sisi lain, kepastian batas kawasan hutan perlu dimantapkan agar mendapatkan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dapat mengancam kelestarian hutan.

Di samping itu, bidang kehutanan masih menjadi isu sensitif baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tingginya perhatian multipihak terhadap pengelolaan hutan berpotensi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, apalagi berkaitan dengan *“miss management”* dan *“conflict of interest”*. Untuk itu, pengelolaan hutan harus dikelola secara holistik dan integral.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional/daerah. Provinsi Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang luas, memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dan lain-lain sudah mulai digalakkan di Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan bertujuan memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 7 (tujuh) perusahaan yang terdiri atas 3 (tiga) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Untuk itu, pembinaan yang terus-menerus dari Dinas Kehutanan diperlukan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumber daya hutan dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan, seperti kayu, ikut mendorong tumbuhnya industri hasil hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/*Sawmill*. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari berpotensi memicu peningkatan kasus penebangan liar, penyerobotan lahan, dan pengambilan hasil hutan secara ilegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.6.1.3 Kelembagaan

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 361 orang dengan status kepegawaian 358 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian:

1. Sekretariat: 33 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan: 15 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat: 12 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE: 22 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL: 13 orang
6. UPTD BSPTH: 8 orang
7. UPTD KPHL BB: 51 orang
8. UPTD KPHL Agam Raya: 22 orang
9. UPTD KPHL 50 Kota: 31 orang
10. UPTD KPHP Dharmasraya: 17 orang
11. UPTD KPHP Mentawai: 14 orang
12. UPTD KPHP Pesisir Selatan: 18 orang
13. UPTD KPHL Pasaman Raya: 31 orang
14. UPTD KPHL Sijunjung: 26 orang

15. UPTD KPHL Hulu Batanghari: 17 orang

16. UPTD KPHL Solok: 28 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Doktor: 1 orang
- b. Magister (S2): 30 orang
- c. Sarjana (S1): 173 orang
- d. Diploma (D3): 22 orang
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA): 124 orang
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 7 orang
- g. Sekolah Dasar (SD) : 1 orang

Dari komposisi tersebut di atas, terdapat tenaga fungsional tertentu yaitu:

- a. Fungsional Polisi Kehutanan: 93 orang
- b. Fungsional Penyuluh Kehutanan: 44 orang
- c. Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan: 3 orang
- d. Fungsional Perencana: 1 orang
- e. Calon Fungsional Pranata Komputer: 1 orang

1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Merujuk arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, baik secara ekologi, sosial/ekonomi, maupun secara kelembagaan. Secara rinci, kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangnnya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat: (1) menurunnya praktek-praktek *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan kayu ilegal, (2) terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (3) terciptanya kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan (4) meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah: (1) meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (2) meningkatnya minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan, (3) terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan perkapita mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), (4) meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (5) terpenuhinya penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri per kayu dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan, dan (6) berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain : (1) meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, (2) tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) terciptanya koordinasi yang mantap dengan pusat dan kabupaten/kota dalam pembangunan kehutanan.

1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP DAN INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO pada bulan Januari 2018. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur

(SOP) seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan *Good Governance and Clean Government*.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan beberapa inovasi pada berbagai kegiatan pada Tahun 2021. Inovasi tersebut telah mengantarkan Dinas Kehutanan berhasil meraih Terbaik II dalam ***Innovative Government Award (IGA) 2021***. Adapun inovasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Layanan Elektronik Data Tematik Urusan Kehutanan (*Silek Datuak*) ini berawal dari konsep sederhana untuk menyediakan informasi dan dokumentasi tematik kehutanan secara interaktif. Filosofinya adalah “Anda butuh, Anda cari” yang diharapkan dapat meningkatkan literasi tematik kehutanan pada masyarakat luas. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan Microsoft Visual Studio 2010 yang memungkinkan masyarakat pengguna informasi berinteraksi langsung pada sistem karena tersedia komunikasi antar muka (*interface*).
2. Simulator Manejer untuk Perencanaan Hutan Tingkat Tapak (*Si Macan Hutan*) dirancang untuk pengelola hutan agar mereka dapat melakukan simulasi-simulasi berbasis komputer untuk menggambarkan sistem sesungguhnya (*real system*) dalam perencanaan. Si Macan Hutan dirancang dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Visual Basic pada Microsoft Visual Studio 2010. Pengelola dapat membangun asumsi perencanaan sesuai kebutuhan dan memberikan alternatif-alternatif skenario untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
3. Sistem Informasi Kawasan Hutan (*SiKawan*) merupakan jawaban dari belum adanya media baik *offline* maupun *online* yang mendukung ketersediaan informasi tentang kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara langsung dan update di Sumatera Barat. Melihat hal tersebut muncul inovasi untuk menyediakan media berbasis spasial yang mudah diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya melalui sebuah Sistem Informasi Kawasan Hutan.

4. Safari Ramadhan Online merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dalam menyikapi wabah Covid-19 dimana Safari Ramadhan Online diterapkan untuk memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan Tahun 2020 dan 2021, yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan kunjungan lapangan langsung. Pertemuan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan dilaksanakan terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kehutanan Sumatera Barat.
5. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google form*. Hasil survei ditayangkan pada website resmi Dishut Sumbar. Dengan demikian, pelanggan dapat mengisi formulir pertanyaan pada komputer/laptop dan HP android masing-masing serta masyarakat dimungkinkan untuk melihat hasilnya secara *real-time* pada website Dishut Sumbar.
6. Sistem Informasi Klarifikasi Hutan dan Lahan (*Siklara*) merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada Masyarakat yang berada di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan dalam rangka memenuhi permohonan masyarakat yang ingin mengetahui status lahan yang mereka miliki apakah berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
7. Kolaborasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (*Kopi Hutan*) merupakan inovasi yang dilakukan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan agar dapat mencegah maupun meminimalisir kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, dengan cara pengelolaan yang memadukan unsur keinginan, budaya, kepercayaan dan hukum, yang secara aktif dan partisipatif yang dilaksanakan oleh pihak terkait baik pemerintah, kepolisian, BUMD, BUMN, dan masyarakat yang mempertimbangkan aspek kelestarian hutan.
8. Barcode Pohon merupakan sebuah sistem informasi yang memudahkan masyarakat menemukenali jenis dan manfaat pohon yang tumbuh dan sengaja ditanam di lingkungan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
9. Literasi Lestari merupakan salah satu bentuk layanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan menyediakan sarana perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kreatifitas pengelola Perpustakaan Dishut untuk meningkatkan

- minat baca dan kepedulian pada arsip. Perpustakaan Dishut Sumbar diharapkan akan menjadi lokomotif bagi Literasi Lestari.
10. Sistem Informasi Kepegawaian Dishut Sumbar yang selama ini dikelola secara konvensional menggunakan lemari arsip kepegawaian. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi, sistem informasi kepegawaian dimungkinkan dibuat dalam sebuah sistem berbasis elektronik. Sistem Informasi Kepegawaian Dishut Sumbar memuat dokumen-dokumen kepegawaian yang dimuat pada sistem yang dirancang berbasis pemrograman. Dokumen tersebut dapat dimutakhirkan secara mudah dan cepat dalam sistem dan juga dapat diunduh untuk memenuhi kebutuhan manajemen kepegawaian.
 11. Sistem Layanan Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu berawal dari konsep sederhana untuk menyediakan informasi dari potensi hasil hutan bukan kayu. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi berbasis website yang mampu di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, update informasi dan akses informasi dapat dengan mudah dilakukan.
 12. Kegiatan Peningkatan Hutan Rakyat (*KA PARAK*) merupakan program yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan untuk masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan penanaman selalu dibiayai oleh pemerintah melalui program-program yang dianggarkan melalui APBD/APBN. Dengan adanya program ‘‘KA PARAK’’ seluruh item kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atas inisiatif sendiri, yang oleh Dinas Kehutanandilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga mampu melaksanakan dan mewujudkan program ini.
 13. Pengurangan Kadar Air Madu Hutan merupakan inovasi yang dilakukan oleh KPHL Pasaman Raya dalam rangka mengurangi kadar air madu hutan yang cukup tinggi menjadi standar pasar nasional dan internasional yaitu dengan kadar air 18 % sd 22 %, dengan kadar air tersebut madu hutan akan memiliki tekstur yang cukup kental, rasa yang alami dan dapat meningkatkan nilai jual yang cukup tinggi sebelum adanya perlakuan pengurangan kadar air.
 14. Aplikasi Perbenihan Online Sistem (APO Sistem) merupakan aplikasi yang dilakukan oleh UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang selama ini melaksanakan pelayanan permohonan permintaan bibit tanaman hutan, sertifikasi sumber benih tanaman hutan, sertifikasi mutu benih tanaman hutan, sertifikasi mutu bibit tanaman hutan, dan pelayanan penetapan pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar secara manual dalam artian masyarakat

atang langsung atau mengirimkan dokumen ke UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan menerapkan kemajuan teknologi UPTD BSPTH membuat rancangan APO SISTEM melalui “*Google Form*” yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya bagi pengguna benih dan bibit tanaman hutan serta para pihak yang membutuhkan informasi terkait perbenihan tanaman hutan. Dengan penerapan APO SISTEM, dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan bidang perbenihan tanaman hutan tanpa harus datang langsung ke kantor UPTD BSPTH dan UPTD BSPTH dapat memberikan pelayanan dengan proses yang cepat untuk masyarakat.

15. Identifikasi dan Analisis Secara Cepat Lokasi Unit Pembangunan Hutan Rakyat (*IKAN SEPAT UNI HAYA*) merupakan terobosan yang dibuat KPHL Lima Puluh Kota untuk melakukan identifikasi dan analisis secara cepat lokasi unit pembangunan hutan rakyat untuk mendukung perencanaan kegiatan RHL pada wilayah UPTD KPHL Lima Puluh Kota. Metode penentuan lokasi pembangunan unit hutan rakyat secara cepat menggunakan data spasial serta informasi lapangan penyuluh kehutanan agar diperoleh unit lokasi pembangunan hutan rakyat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dengan menggunakan data spasial serta data base yang dikelola oleh penyuluh kehutanan. Adanya inovasi ini maka kegiatan perencanaan unit pembangunan hutan rakyat menjadi lebih baik yang akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan hutan rakyat nantinya.

Di samping itu penghargaan lainnya yang berhasil diperoleh Dinas Kehutanan adalah Penghargaan Tingkat Nasional Wana Lestari pada Kategori:

1. LPHN Simarasok sebagai Juara I Tingkat Nasional
2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Sdr. Ritno sebagai Terbaik ke II.
3. HKM Baringin Sakti sebagai Terbaik II.
4. Kelompok Pencinta Alam (KPA) Unand sebagai Terbaik II
5. Kader Konsevasi Alam (KKA) Sdr. Boyke Mardonal sebagai Terbaik III.
6. Hutan Adat Koto Besar Dharmasraya sebagai Terbaik III.
7. Penyuluh Kehutanan PNS, Sdri. Reni Rahmayulis sebagai Terbaik III
8. Kelompok Tani Hutan Konsevasi Mandiri Solok Selatan sebagai Terbaik Harapan I.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja (LKj) ini pada dasarnya merupakan penjabaran pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance*

agreement) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/676/ED/GSB-2021 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pdokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk table)

- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Realisasi Anggaran

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan. Dari dokumen RPJMD tersebut, Dinas Kehutanan menyusun rencana strategis yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, target, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan, yang kemudian digunakan menjadi dasar penyusunan ikhtisar perjanjian kinerja.

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan tahun 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan satu tujuan berdasarkan rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

| No. | Tujuan Organisasi Awal | Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB | Tujuan Organisasi sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018 |
|-----|--|--|--|
| 1. | Memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari. | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan |
| 2. | Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal | Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya. | Meningkatnya kinerja organisasi |
| 3. | Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan | |
| 4. | Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan, | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | |

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada bulan November 2019 dan evaluasi Biro Organisasi Setda

Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember 2019 maka IKU Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang awalnya berjumlah sembilan IKU menjadi lima IKU. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu | % | 80 | 81 | 82 | - | - | - | | |
| | | | Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | | |
| | | Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat | Persentase penurunan luas lahan kritis | % | 0,18 | 0,43 | 1,09 | - | - | - | | |
| | | | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | % | - | 4,15 | 10 | 12 | 14 | 15 | | |
| | | | Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | % | 5 | 10 | 45 | - | - | - | | |
| | | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | % | 5,32 | 8,50 | 11,68 | 14,86 | 18,03 | 21,21 | | |
| | | 2. | Meningkatnya Kinerja Organisasi | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | | | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 95% | 95% | 95% | - | - | - |

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

| Sasaran | Kebijakan | Strategi | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Pemantapan Kawasan Hutan | Percepatan Proses Penyelesaian RTRW Subtansi Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Hutan <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan - Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH b. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung - Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH c. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) |
| | Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan | Peningkatan Kinerja Pengusahaan dan Penatausahaan Hasil Hutan serta Industri Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Hutan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan b. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) <ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH |

| Sasaran | Kebijakan | Strategi | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|--|--|--|---|
| | | | - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan |
| Menurunnya Laju Kerusakan Hutan | Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim | Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Menunjang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 1. Program Pengelolaan Hutan a. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan |
| | Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan | Penyediaan bibit dan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 1. Program Pengelolaan Hutan a. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan b. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan - Sertifikasi Mutu Bibit - Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit - 2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya a. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi |
| Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan | Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Skema HTR, HN dan HKm | 1. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial |
| Meningkatnya tata kelola organisasi | Percepatan Proses SPJ, Pelaporan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Internal Dinas Kehutanan | Peningkatan Kinerja Dinas Kehutanan pada Setiap Bidang dan Perencanaan Setiap Kegiatan yang Lebih Baik | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| Sasaran | Kebijakan | Strategi | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---------|-----------|----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya e. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan bahan logistik Kantor - Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

Sumber: Revisi Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, untuk merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan pemberi amanah, yaitu Gubernur Sumatera Barat, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim

evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tim evaluasi Biro Organisasi setda Provinsi Sumatera Barat. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% |
| | | b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | 85% |
| 2. | Menurunnya laju kerusakan hutan | a. Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% |
| 3. | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | a. Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21% |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB |

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2021 adalah tahun kelima untuk Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

| No | SASARAN | | | CARA MENCAPAI SASARAN | |
|----|---|--|--------|---|---------------------------|
| | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | KEBIJAKAN STRATEGIS | PROGRAM |
| 1 | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan | Program Pengelolaan Hutan |
| | | 2. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | 85% | Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil | Program Pengelolaan Hutan |

| No | SASARAN | | | CARA MENCAPAI SASARAN | |
|-----|--|--|--------|--|--|
| | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | KEBIJAKAN STRATEGIS | PROGRAM |
| | | | | hutan serta industri kehutanan | |
| II | Menurunnya laju kerusakan hutan | 1. Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% | <p>Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan. Penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>Penyediaan bibit dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan</p> | <p>1. Program Pengelolaan Hutan</p> <p>2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</p> <p>3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> |
| III | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | 1. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21% | Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm | 1. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan |
| IV | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |

Sumber: Renja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Prov. Sumbar Tahun 2021

2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya, Rencana Kinerja Sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program pembangunan kehutanan maupun program pendukung lainnya yang terdiri atas kegiatan pembangunan kehutanan maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Secara ringkas, Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2021

| | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA |
|---|--|--|----------------|
| I | Program Pengelolaan Hutan | Jumlah unit usaha berbasis kehutanan | 20 Unit |
| A | Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Terlaksananya pemanfaatan hutan pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia | 2 Unit |

| PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA |
|---|---|----------------------|
| 2 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia | 1 Laporan |
| 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBPN) | 10 KPH |
| | Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi | 27 Unit |
| 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBPN) | 10 KPH |
| | Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung | 20 Unit |
| 5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan | 1 Lokasi |
| 6 Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH | 1 Lokasi |
| | Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH | 10 Dokumen |
| B Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan | Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan | 7 Sertifikat |
| 7 Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit | Jumlah sertifikasi mutu bibit | 10 Sertifikat |
| 8 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit | 6 Unit |
| II PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 50,000 Hektar |
| | Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan | 20 Unit |
| C Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 9 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya. | 75 Orang |
| | jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara | 1 Unit |
| 10 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi | 50 Kelompok |
| 11 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi | 50 Kelompok |
| | Jumlah usulan Perhutanan Sosial | 50 Kelompok |
| | Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum | 180 orang |
| | Jumlah fasilitasi kewirausahaan | 15 Kali |
| | Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi | 20 unit |
| Program Pengelolaan Hutan | Indeks tutupan hutan | 61,41 Indeks |
| D Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Terlaksananya pengelolaan rencana tata hutan pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 12 Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun | 11 Dokumen |
| 13 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | sub kegiatan : Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana | 70 Km |

| PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA |
|--|--|---------------------|
| 14 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara | 18 Unit |
| F Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Terehabilitasinya lahan diluar kawasan hutan pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 15 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun | 1 Dokumen |
| 16 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang terbangun | 460 Hektar |
| 17 Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan | 40 Unit |
| 18 Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah unit persemaian | 1 Unit |
| | Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun | |
| | Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik | 2 Unit |
| 19 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL | 1 Dokumen |
| | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 | 1 Dokumen |
| G Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 20 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani | 2 Kasus |
| | Jumlah Patroli Pengamanan Hutan | 150 Kali |
| | Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan | 6 peta |
| | Jumlah satgas LMPHBN | 450 Orang |
| 21 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan | 20 Kali |
| 22 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH. | 97 Kali |
| | Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi. | 150 Orang |
| H Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Terlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH | 10 KPH |
| 23 Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif | 16 Komoditi |
| III PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Indeks Tutupan Hutan | 61,48 Indeks |
| J Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH | 10 KPH |
| 24 Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi | 1 Lokasi |
| IV PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Indeks Tutupan Hutan | 61,48 Indeks |
| K Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH | 10 KPH |
| 25 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | Jumlah kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi | 2 DAS |

| PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA |
|--------------------------------|--|--|----------------|
| 26 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-numerasi | 30 Petak |
| | | monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun | 10 KPH |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Terlaksananya Urusan Penunjang | 100 % |
| A | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |
| 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) | 9 Dokumen |
| | | Dokumen Renstra dan Renja Dishut yang disusun | 2 Dokumen |
| 2 | 3.28.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen evaluasi kinerja triwulan | 4 Dokumen |
| | | Dokumen evaluasi perangkat daerah LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan) | 4 Dokumen |
| B | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % |
| 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN Dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun | 409 orang |
| 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Sistem Informasi, Petugas PPHPK) | 12 bulan |
| 5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan |
| 6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan dan semesteran | 13 Laporan |
| C | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % |
| 7 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Gedung | 2 Unit |
| | | Honorarium pengelola asset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian asset | 12 Bulan |
| | | Kendaraan dinas operasional | 12 Unit |
| D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % |
| 8 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan | 573 orang |
| 9 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Aparatur Sipil Negara Dishut yang mangikuti BIMTEK | 100 orang |
| E | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |
| 10 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan |
| 11 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Bulan |
| 12 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan |
| | | Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu | 12 Bulan |

| PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA |
|--------------------------------|--|--|----------------|
| 13 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan |
| 14 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 1 Jenis |
| 15 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan |
| F | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % |
| 16 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Pengadaan mebeleur yang diadakan | 3 Jenis |
| G | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % |
| 17 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang didistribusikan | 3600 Surat |
| 18 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Air | 14508 M3 |
| | | Internet | 120 mbs |
| | | Listrik | 230,400 KWH |
| | | Telepon | 16 Rek. Telp |
| 19 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor PTT | 13 Bulan |
| | | Jasa kebersihan kantor | 13 Bulan |
| | | Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan) | 12 Bulan |
| | | Jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program Ramadhan) | 12 Bulan |
| | | Jasa pengamanan kantor | 13 Bulan |
| | | Jasa sopir kantor | 13 Bulan |
| H | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |
| 20 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas / operasional | 44 Unit |
| | | Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | 44 Unit |
| 21 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor yang dipelihara | 8 Unit |
| | | Rumah dinas / mess yang dipelihara | 7 Unit |
| | | Rumah dinas/mess yang direhabilitasi | 1 Unit |
| 22 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor yang dipelihara | 287 Unit |
| | | Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan |

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Postur anggaran Tahun 2021 pada Dinas Kehutanan terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR), dana Pokir dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan.

Postur anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 90.379.848.445,- dan mengalami perubahan menjadi

Rp. 78.657.557.809,- atau turun 12,97%., Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci, Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Belanja Tidak Langsung (Rp) | Belanja Langsung (Rp) |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Pagu Awal | 40.836.294.419 | 49.543.554.016 |
| 2 | Rasionalisasi | - | (3.112.598.630) |
| 3 | Perubahan | (1.441.022.997) | (7.168.668.999) |
| Jumlah | | 39.395.271.422 | 39.262.286.387 |
| % | | 50,08 | 49,92 |

Sumber: Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Sumbar 2021

Jika dibandingkan dengan Anggaran pada Tahun 2020 dimana Belanja Tidak Langsung Rp. 41.256.768.496,- dan Belanja langsung Rp. 15.907.790.632,- maka Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.1.861.497.074,- dan Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.354.495.755,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi untuk pembangunan kehutanan pada Tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2020, yang ditandai dengan semakin bertambahnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (Belanja Langsung) dan juga dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung).

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran 2021 | | Anggaran 2020 | |
|---------------|---|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Rp | % | Rp | % |
| 1 | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 3.717.779.115 | 4,73 | 60.151.250 | 0,38 |
| | | Nilai PNBK sektor kehutanan | 1.015.182.655 | 1,29 | 1.433.102.300 | 9,01 |
| 2 | Menurunnya laju kerusakan hutan | Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan | 16.934.192.117 | 21,53 | 8.223.353.094 | 51,69 |
| 3 | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 8.540.553.387 | 10,86 | 1.031.780.600 | 6,49 |
| 4 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | 48.449.850.535 | 61,60 | 5.159.403.388 | 32,43 |
| Jumlah | | | 78.657.557.809 | 100,00 | 15.907.790.632 | 100,00 |

Sumber: Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Tahun 2021 dan 2020

Mencermati Tabel 9 tersebut di atas, urusan kehutanan pada sasaran strategis Menurunnya Laju Kerusakan Hutan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan memiliki porsi anggaran terbesar pada Tahun Anggaran 2021 yaitu mencapai 21,53%, meskipun mengalami penurunan persentase dibandingkan Tahun Anggaran 2020 yang mencapai 51,69% namun secara anggaran bertambah Rp. 8.710.839.023,-.

Porsi Anggaran Tahun 2021 pada Sasaran Strategis Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan juga mengalami penambahan yang cukup signifikan sebesar Rp. 3.239.708.220,- jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010.

Upaya mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan pada Tahun 2021 didukung dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 8.540.553.387,- atau setara dengan 10,86% total anggaran pada tahun yang sama. Alokasi anggaran tersebut untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang meningkat, Dinas Kehutanan didukung dengan porsi anggaran mencapai 60,61% dari total pagu anggaran Tahun 2021 atau setara dengan Rp 48,449.850.535-. Tahun 2021 porsi anggaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih leluasa mendorong sejumlah upaya pembangunan kehutanan di Sumatera Barat untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Proses pengukuran (*assessment*) dan penilaian yang sistematis merupakan suatu cara untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran pada instansi pemerintah dimana esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan komitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/676/ED/GSB-2021 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

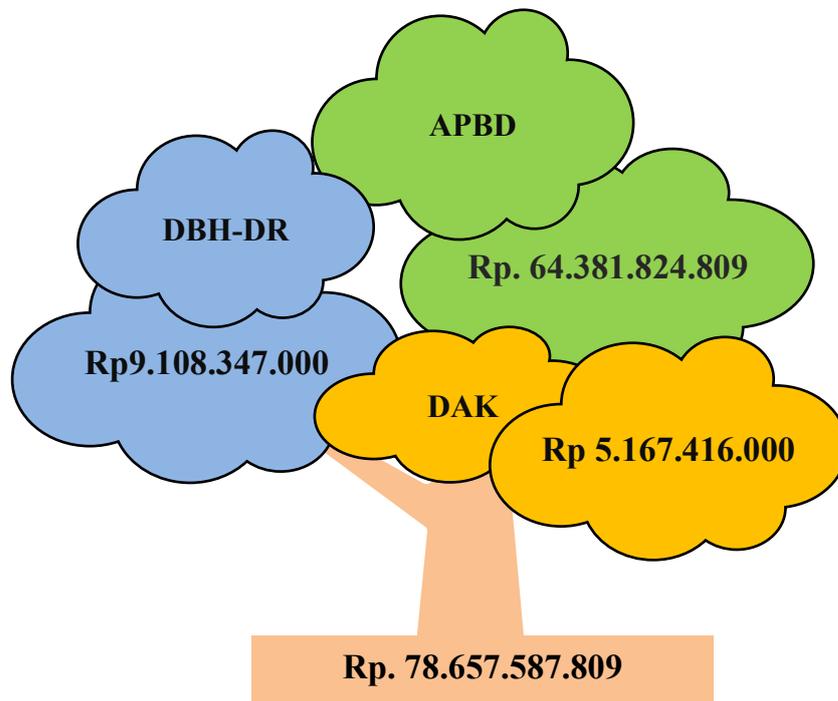
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Klasifikasi | Predikat | Kode |
|-----|-------------|-------------|------|
| 1. | 85% - 100% | Sangat Baik | |
| 2. | 69% - 84% | Baik | |
| 3. | 53% - 68% | Cukup | |
| 4. | < 53% | Gagal | |

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

POSTUR ANGGARAN 2021





Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut di atas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian dan provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian Realisasi (%) | Kode |
|--|---|---|--------|-----------|-----------------------|------|
| 1. | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 | |
| | | Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | 85% | 94.29% | 110.93 | |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I | | | | | 105.46 | |
| 2. | Menurunnya laju kerusakan hutan | Persentase penurunan luas kerusakan hutan | 15% | 19.75% | 131.67 | |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II | | | | | 131.67 | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian Realisasi (%) | Kode |
|---|--|---|---------------|--------------|-----------------------|------|
| 3. | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21.21% | 25.12% | 118.43 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III | | | | | 118.43 | |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (80.00) | A (83.11) | 103.89 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV | | | | | 103.89 | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV | | | | | 114.86 | |

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2021

Hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 dimana Dinas Kehutanan berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 114,86% yang termasuk kategori keberhasilan **SANGAT BAIK**.

Pencapaian sasaran strategis dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil yaitu sesuai target dan bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target. Capaian realisasi indikator tertinggi adalah Persentase penurunan luas kerusakan hutan (131,67%). Selain sebagai dampak dari kebijakan pengelolaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, juga dampak dari pengembangan perhutanan sosial yang dilakukan secara intensif oleh Dinas Kehutanan, melalui kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dukungan tersebut sebagai upaya dalam pengembangan perhutanan sosial, dimana dukungan areal kelola tersebut juga berdampak pada pengembangan sektor pangan, sektor energi terbarukan, pariwisata, desa tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 11 di atas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan di atas merupakan hasil realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama antar Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

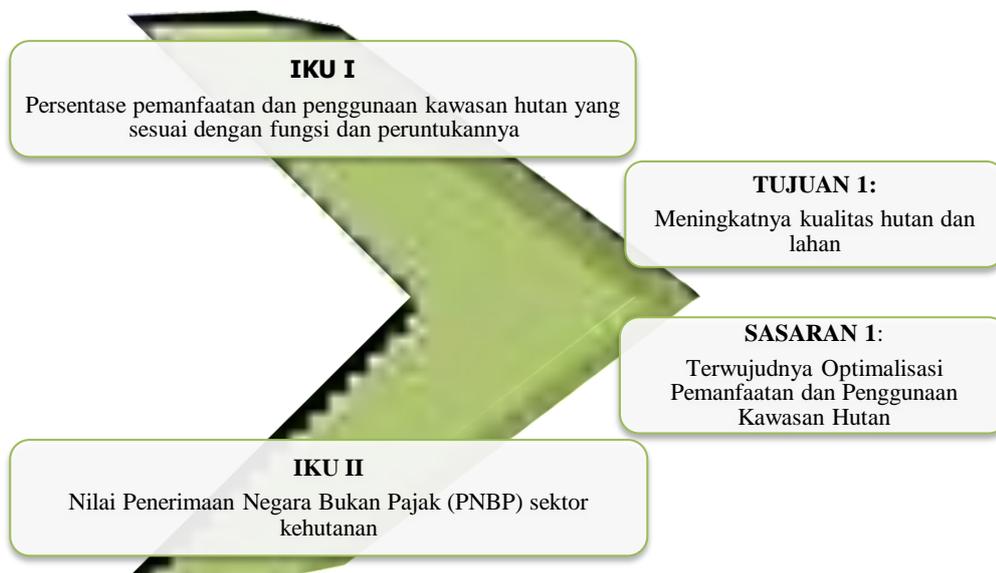
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 11, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan

Tujuan **Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan tiga Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu **Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan** dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 1

“Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta

Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017 adalah $\pm 2.286.883$ Ha atau 54,07% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ($\pm 4.229.730$ Ha) dengan komposisi fungsi kawasan hutan yang dikelola yaitu Hutan Lindung (± 775.305 Ha) dan Hutan Produksi (± 745.955 Ha). Sumatera Barat memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan, baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari Sasaran 1 disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2021

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|--------|-----------|---------------|
| 1. | Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 |
| | | Nilai PNBPN sektor kehutanan | 85% | 94,29% | 110,93 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) | | | | | 105,46 |

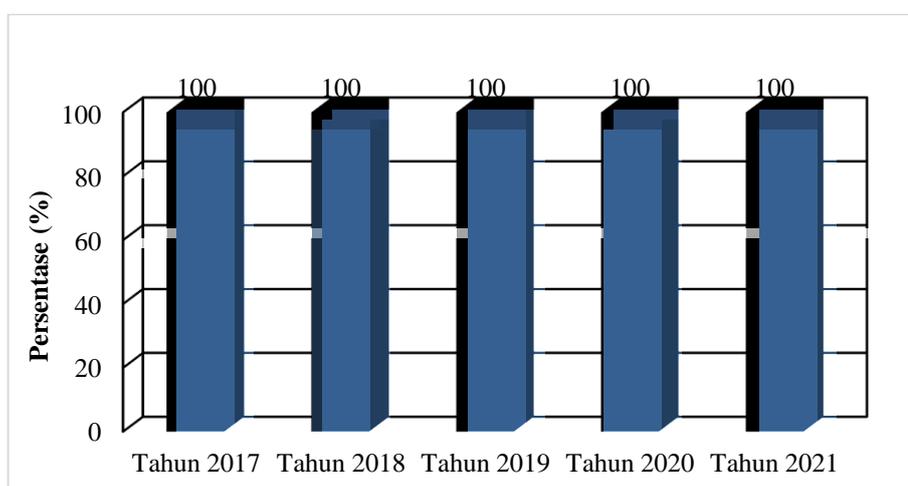
Tabel 12 tersebut memperlihatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis I Tahun 2021 berhasil dicapai dengan rata-rata capaian sasaran 105,46% atau naik 6,08% dari tahun sebelumnya (99,38%). Capaian tersebut menggambarkan bahwa kawasan hutan Sumatera Barat telah dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya berdasarkan target yang ditetapkan oleh Gubernur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta telah sesuai dengan arah kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan yang telah sesuai dapat juga meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 dan Tahun 2020

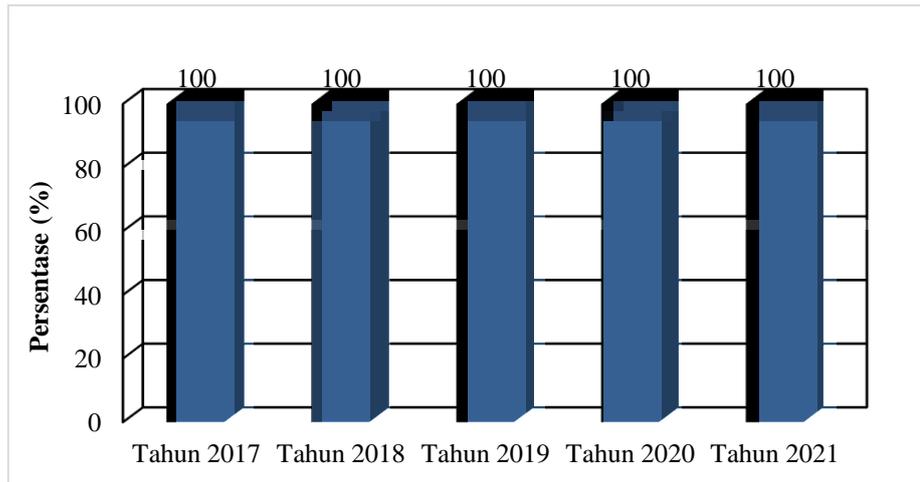
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target | | 2021 (n) | | 2020 (n-1) | |
|---|---|--------|------|-----------|---------|------------|---------|
| | | 2021 | 2020 | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Nilai PNBP sektor kehutanan | 85% | 84% | 94,29% | 110,93% | 82,96% | 98,76% |

Capaian kinerja masing-masing indikator pada tabel di atas untuk indikator kinerja I yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNBP Sektor Kehutanan terealisasi 94,29% atau naik 11,33% dibandingkan tahun sebelumnya (82,96%). Dari realisasi dua indikator kinerja di atas artinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah optimal dan melebihi target yang ditetapkan.

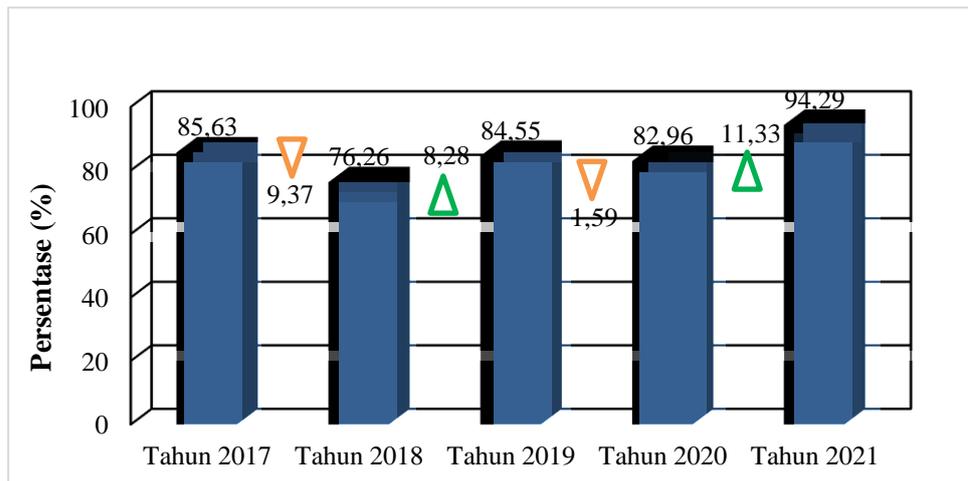
Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3, 4, 5 dan 6.



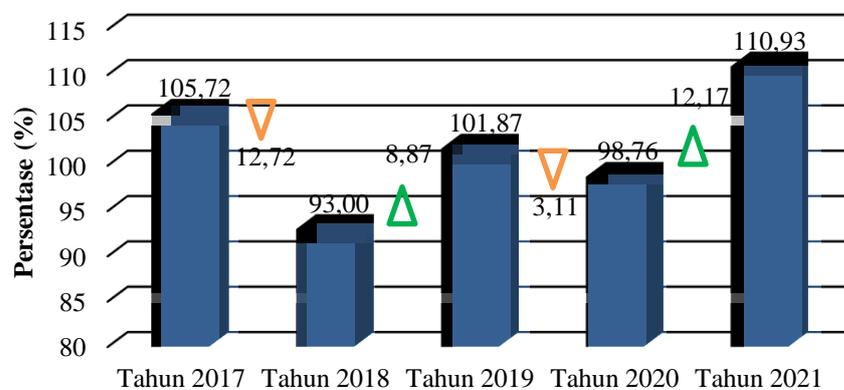
Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2017 - 2021



Gambar 4. Capaian Kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2017-2021



Gambar 5. Realisasi Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2017 - 2021



Gambar 6. Capaian Kinerja Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2017 - 2021

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target akhir RPJMD/Renstra | Realisasi Tahun 2021 | Tingkat Kemajuan (%) |
|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 |
| | Nilai PNBPN sektor kehutanan | 85% | 94,29% | 110,93 |

Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 1 dan 2 jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya, pada tahun kelima Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.
- b. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNBPN sektor kehutanan, pada tahun kelima Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 110,93% atau telah melampaui target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan tahun kelima RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Realisasi dari kedua indikator kinerja pada Tahun 2021 di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja yang seharusnya dicapai.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|
| | | Sumbar 2021 | Sumbar 2020 | KemenLHK 2021 |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | 1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100% |
| | 2.Nilai PNBPN sektor kehutanan | 94,29% | 82,96% | 150,54% |

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pada Tahun 2021 pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat tercapai 100% yang dapat dilihat dari tercapainya seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan di seluruh Kawasan Hutan. Sedangkan capaian PNBPN Sektor Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari target Rp. 1,4 Trilyun (100%) terealisasi Rp. 2,18 Trilyun atau setara dengan 150,54%, dimana persentase ini lebih tinggi jika dibanding dengan capaian Dinas Kehutanan (94,29%). Tingginya capaian PNBPN tersebut dikarenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan Sistem Informasi PNBPN-PKH dalam pencapaian target PNBPN Tahun 2021, sehingga meskipun dalam masa pandemi Covid-19 tetap mampu optimal mencapai PNBPN nasional.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Capaian Realisasi Tahun 2021 | | |
|--|---|------------------------------|------|-------|
| | | Sumbar | Riau | Jambi |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | 1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100% |
| | 2.Nilai PNBPN sektor kehutanan | 110,93% | - | - |

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 1 untuk Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau menunjukkan realisasi 100%. Dalam penentuan indikator ini terdapat perbedaan penetapan lingkup indikator kinerja dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menggunakan nomenklatur indikator kinerja persentase izin/wilayah kerja dengan target 100% yang merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan DAS, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan

Masyarakat. Sedangkan Dinas Kehutanan Jambi berupa indikator kinerja tujuan dengan indikator persentase pengelolaan hutan yang lestari dengan target 50% dan tercapai 100%

Nilai PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2021 tidak menjadi Indikator Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, sedangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menjadi indikator adalah Kontribusi retribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 1,5%.

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula **luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada Tahun 2021 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada Tahun 2021 dikalikan angka 100%.**

Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2021 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2021.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | | | | Realisasi | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | Capaian % | TRW II | Capaian % | TRW III | Capaian % | TRW IV | Capaian % |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 0% | 70% | 70% | 100% | 0% | 100 | 50% | 71.4 | 70% | 100 | 100% | 100 |

Tabel 17 di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator rerata setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat mendorong dilakukannya pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peruntukan dan perizinannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada Tahun 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap unit-unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|----|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| 1. | Bupati Pasaman Barat | Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang – Air Bangis | 122,01 | HP dan HL | Sesuai |
| 2. | PT. Gamindra Mitra Kesuma | Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang | 102,22 | HP | Sesuai |
| 3. | LAPAN | Loka pengamatan Atmosfer | 17,17 | HPT | Sesuai |
| 4. | Bupati Lima Puluh Kota | Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tengah | 8,37 | HPK | Sesuai |
| 5. | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok | 14,48 | HPK | Sesuai |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok | Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek | 4,40 | HPT | Sesuai |

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|--|---|----------------------------|-----------------------|--|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok | Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin | 0,571 | HPT | Sesuai |
| 8. | Bupati Solok | Pembangunan jalan ruas Kapujan – Rimbo Data dan Garabak Data – Batu Bajanjang | 11,45 | HL Batang Palangki | Sesuai |
| 9. | Walikota Padang | Pembangunan jalan Bungus – Kalampaian | 17,05 | HL | Sesuai |
| 10. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman | Pembangunan Intake dan jaringan Pipa Air Bersih | 0,0575 | HL Barisan I | Sesuai |
| 11. | PT. Galian Endapan Buana | Pertambangan galena | 153,89 | HP | Sesuai |
| 12. | Bupati Kepulauan Mentawai | Pembangunan Instalasi Listrik Biomasa | 5,29 | HP | Sesuai |
| 13. | PT. Semen Padang | Tambang Batu Kapur | 242,30 | HPT | Sesuai |
| 14. | PT. Hitay Daya Energy | Eksplorasi Panas Bumi (Geothermal) | 679,00 | HL | Sesuai |
| 15. | PT. Allied Indo Coal Jaya | Tambang Batubara | 388,96 | HP Serasah | Sesuai |
| 16. | Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto | Pembangunan Embung, Intake Air Baku dan Jalan Sumpahan | 3,65 | HPK | Sesuai |
| 17. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumbar | Rehabilitasi bending dan jaringan irigasi Batang Sangka I | 2,00 | HL | Sesuai |
| 18. | PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS | Pembangunan PLTU | 51,192 | HL | Sesuai |
| 19. | PT. PLN (Persero) | SUTT dan Tapak Tower Ombilin - KiliranJao | 18,37 | HL & HP | Sesuai |
| 20. | PT. Multi Energi Dinamika | PLTM Tarusan | 4,50 | HL | Masa berlaku izin telah habis |
| 21. | PT. PLN (Persero) | Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh | 25,78 | HL dan HP | Sesuai |
| 22. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar | Pembangunan terowongan jalan Balingka - Sianok | 2,70 | HL | Sesuai |
| 23. | Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan | Pembangunan Jalan Tanjung Durian - Talangam | 12,83 | HL dan HPT | Dalam Proses Revisi |
| 24. | PT. Dempo Sumber Energi | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pelangai Hulu dan Sarana Penunjangnya | 54,18 | HPT dan HPK | Sesuai |
| 25. | PT. Bumi Indonesia Bersinar | Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya | 348,62 | HPT | Sesuai |
| 26. | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Jalan Trans Mentawai | 254,24 | HP dan HPK | Sesuai |

| No | Nama Perusahaan/ Pegguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|---|--|---|--|-------------------------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| 27. | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | Pembangunan Jalan Kabupaten | 89,90 | HP dan HPK | Sesuai |
| 28. | Pemerintah Kabupaten Pasaman | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Rao - Padang Lawas | 14,89 | HL | Sesuai |
| 29. | Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan | Pembangunan Jalan Koto Birah - Simancuang | 4,99 | HL dan HPT | Sesuai |
| 30. | PT. PLN (Persero) | Jaringan Transmisi Eksisting 150 kV Singkarak - Padang Panjang | 11,03 | HL | Sesuai |
| 31. | PT. PLN (Persero) | Pembangunan SUTT 150 kV Gardu Induk Muaro Labuh - Sungai Rumbai | 33,93 | HL, HP dan HPK | Sesuai |
| 32. | PT. PLN (Persero) | Pembangunan Jalur SUTET 275 kV Payakumbuh - Garuda Sakti | 20,22 | HL, HPT dan HP | Sesuai |
| 33. | PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan – sangir Jujuhan Solse | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam | ± 28.840 | HP | Masa Berlaku Izin Telah Habis |
| 34. | PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti – Siberut Barat | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam | ± 47.605 | HP | Sesuai |
| 35. | PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam | ± 28.885 | HPT | Sesuai |
| 36. | PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Polaga – Sikakap | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam | ± 78.000 | HP | Sesuai |
| 37. | PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp MuaraTakung – Sjjg | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman | ± 28.617 | HP | Sesuai |
| 38. | PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman | ± 15.357 | HP | Sesuai |
| 39. | PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman | 1.583,90 | HP | Sesuai |
| 40. | PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI Camp. Mauara Sikabalan – Kep. Mentawai | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan – Hutan Tanaman | ± 19.875 | HP | Sesuai |
| 30. | 1. LPHN Simanau 2. LPHN Sirukam 3. LPHN Sungai Abu 4. LPHN Sariak Alahan Tigo 5. LPHN Simancuang 6. LPHN Pulakek Koto Baru | Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN) Hutan Nagari (HN) | 1.088 1.789,83 6.657 4.138 650 4.265 | HL HL HL HL HL HL & HPT | Sesuai |

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| 7. | LPHN Pakan Rabaa | Hutan Nagari (HN) | 4.260 | HL & HPT | |
| 8. | LPHN Pasir Talang Timur | Hutan Nagari (HN) | 2.395 | HL & HPT | |
| 9. | LPHN Koto Baru | Hutan Nagari (HN) | 1.145 | HL & HPT | |
| 10. | LPHN Ranah Pantai Cermin | Hutan Nagari (HN) | 1.952 | HL | |
| 11. | LPHN Padang Limau Sundai | Hutan Nagari (HN) | 2.244 | HL | |
| 12. | LPHN Sako Utara Pasie Talang | Hutan Nagari (HN) | 204 | HL | |
| 13. | LPHN Lubuk Gadang Selatan | Hutan Nagari (HN) | 4.550 | HL | |
| 14. | LPHN Pakan Rabaa Timur | Hutan Nagari (HN) | 5.140 | HL & HPT | |
| 15. | LPHN Padang Air Dingin | Hutan Nagari (HN) | 1.993 | HL | |
| 16. | LPHN Padang Gantiang | Hutan Nagari (HN) | 1.579 | HL | |
| 17. | LPHN Pakan Rabaa Tengah | Hutan Nagari (HN) | 327 | HPT | |
| 18. | LPHN Lubuk Malako | Hutan Nagari (HN) | 761 | HL | |
| 19. | LPHN Paru | Hutan Nagari (HN) | 4.500 | HL | |
| 20. | LPHN Muaro Takung | Hutan Nagari (HN) | 1.169 | HL | |
| 21. | LPHN Lubuk Tarantang | Hutan Nagari (HN) | 247 | HL | |
| 22. | LPHN Manganti | Hutan Nagari (HN) | 1.247 | HL | |
| 23. | LPHN Sungai Betung | Hutan Nagari (HN) | 597 | HL | |
| 24. | LPHN Aie Angek | Hutan Nagari (HN) | 4.025 | HL | |
| 25. | LPHN Langki | Hutan Nagari (HN) | 504 | HL | |
| 26. | LPHN Sisawah | Hutan Nagari (HN) | 2.502 | HL | |
| 27. | LPHN Timbulun | Hutan Nagari (HN) | 76 | HL | |
| 28. | LPHN Pulasan | Hutan Nagari (HN) | 348 | HL | |
| 29. | LPHN Silongo | Hutan Nagari (HN) | 154 | HL | |
| 30. | LPHN Kampung Dalam | Hutan Nagari (HN) | 140 | HL | |
| 31. | LPHN Sumpur Kudus | Hutan Nagari (HN) | 3.862 | HL | |
| 32. | LPHN Tanjung Bonai Aur | Hutan Nagari (HN) | 366 | HL & HP | |
| 33. | LPHN Unggan | Hutan Nagari (HN) | 5.080 | HL | |
| 34. | LPHN Buluh Kasok | Hutan Nagari (HN) | 763 | HL | |
| 35. | LPHN Lubuk Tarok | Hutan Nagari (HN) | 1.828 | HL | |
| 36. | LPHN Air Bangis | Hutan Nagari (HN) | 2.664 | HL | |
| 37. | LPHN Katiagan | Hutan Nagari (HN) | 780 | HL | |
| 38. | LPHN Simpang | Hutan Nagari (HN) | 616 | HL | |
| 39. | LPHN Muaro Sei Lolo | Hutan Nagari (HN) | 1.620 | HL | |
| 40. | LPHN Tanjung Betung | Hutan Nagari (HN) | 375 | HL | |
| 41. | LPHN Ganggo Mudiak | Hutan Nagari (HN) | 2.764 | HL & HPT | |
| 42. | LPHN Padang Mentinggi | Hutan Nagari (HN) | 3.485 | HL | |
| 43. | LPHN Muara Tais | Hutan Nagari (HN) | 9.428 | HL | |
| 44. | LPHN Alahan Mati | Hutan Nagari (HN) | 340 | HL | |
| 45. | LPHN Silayang | Hutan Nagari (HN) | 5.229 | HL | |
| 46. | LPHN Koto Nopan | Hutan Nagari (HN) | 10.656 | HL | |
| 47. | LPHN Jambak | Hutan Nagari (HN) | 4.220 | HL & HPT | |
| 48. | LPHN Lubuk Gadang | Hutan Nagari (HN) | 2.364 | HL | |
| 49. | LPHN Gunung Selasih | Hutan Nagari (HN) | 4.332 | HL | |
| 50. | LPHN Lubuk Karak | Hutan Nagari (HN) | 1.708 | HL & HPT | |
| 51. | LPHN Pagadih | Hutan Nagari (HN) | 768 | HL | |
| 52. | LPHN Padang Tarok | Hutan Nagari (HN) | 250 | HL | |
| 53. | LPHN Simarasok | Hutan Nagari (HN) | 394 | HL | |
| 54. | LPHN Koto Kaciak | Hutan Nagari (HN) | 143 | HL | |

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| | 55. LPHN Lubuk Basung | Hutan Nagari (HN) | 119 | HL | |
| | 56. LPHN Baringin | Hutan Nagari (HN) | 484 | HL | |
| | 57. LPHN Kamang Hilia | Hutan Nagari (HN) | 364 | HL | |
| | 58. LPHN Sitalang | Hutan Nagari (HN) | 255 | HL | |
| | 59. LPHN Koto Rantang | Hutan Nagari (HN) | 1.509 | HL & HPT | |
| | 60. LPHN Pasia Laweh | Hutan Nagari (HN) | 4.025 | HL & HPT | |
| | 61. LPHN Kamang Mudiak | Hutan Nagari (HN) | 2.800 | HL | |
| | 62. LPHN Sungai Buluh | Hutan Nagari (HN) | 780 | HL | |
| | 63. LPHN Sungai Rimbang | Hutan Nagari (HN) | 663 | HL | |
| | 64. LPHN Taeh Bukik | Hutan Nagari (HN) | 438 | HL | |
| | 65. LPHN Kubang | Hutan Nagari (HN) | 73 | HL | |
| | 66. LPHN Taram | Hutan Nagari (HN) | 800 | HL | |
| | 67. LPHN Kurai | Hutan Nagari (HN) | 1.464 | HL | |
| | 68. LPHN Sungai Balantiak | Hutan Nagari (HN) | 467 | HL | |
| | 69. LPHN Pandam Gadang | Hutan Nagari (HN) | 850 | HL | |
| | 70. LPHN Banja Laweh | Hutan Nagari (HN) | 807 | HL | |
| | 71. LPHN VII Koto Talago | Hutan Nagari (HN) | 186 | HL | |
| | 72. LPHN Sialang | Hutan Nagari (HN) | 7.256 | HL & HPT | |
| | 73. LPHN Baruah Gunung | Hutan Nagari (HN) | 2.133 | HL | |
| | 74. LPHN Harau | Hutan Nagari (HN) | 3.096 | HL | |
| | 75. LPHN Koto Tinggi | Hutan Nagari (HN) | 1.460 | HL | |
| | 76. LPHN Simpang Kapuak | Hutan Nagari (HN) | 4.612 | HL | |
| | 77. LPHN Batipuah Baruah | Hutan Nagari (HN) | 519 | HL | |
| | 78. LPHN Kambang Timur | Hutan Nagari (HN) | 815 | HPT | |
| | 79. LPHN Lunang | Hutan Nagari (HN) | 3.233 | HPT | |
| | 80. LPHN Lunang Tengah | Hutan Nagari (HN) | 1.163 | HPT | |
| | 81. LPHN Kapujan Koto Berapak | Hutan Nagari (HN) | 111 | HL | |
| | 82. LPHN Barung2 Belantai Selatan | Hutan Nagari (HN) | 432 | HL | |
| | 83. LPHN Pondok Parian Lunang | Hutan Nagari (HN) | 1.386 | HPT | |
| | 84. LPHN Tigo Koto Silungkang | Hutan Nagari (HN) | 2.751 | HL | |
| | 85. LPHN Paninjauan | Hutan Nagari (HN) | 57 | HL | |
| | 86. LPHN Rangkiang Luluh | Hutan Nagari (HN) | 1.018 | HL | |
| 31. | 1. HKm Maju Bersama | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 145 | HL | Sesuai |
| | 2. HKm Gunung Leco | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 1.360 | HL | |
| | 3. HKm Ingin Makmur | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 528 | HL | |
| | 4. HKm ICU | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 4.050 | HL | |
| | 5. HKm Pasada Roha Bulu Laga | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 1.172 | HL | |
| | 6. HKm Marguna Alam | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 2.000 | HL | |
| | 7. HKm Situak | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 167 | HL | |
| | 8. HKm Roba Julu | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 358 | HL | |
| | 9. HKm Gunung Sigantang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 580 | HL | |
| | 10. HKm Suka Menang Aia Kacang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 617 | HL | |
| | 11. HKm Saiyo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 96 | HL | |

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| 12. | HKm Rap Hita Saiyo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 100 | HL | |
| 13. | HKm Tombang Pinang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 100 | HL | |
| 14. | HKm Harapan Baru | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 100 | HL | |
| 15. | HKm Karya Setia | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 150 | HL | |
| 16. | HKm Pangduhu Maju | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 140 | HL | |
| 17. | HKm Sontra | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 350 | HL | |
| 18. | HKm Beringin Sakti | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 230 | HL | |
| 19. | HKm Bukit Lestari | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 100 | HL | |
| 20. | HKm Patamuan Saiyo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 496 | HL | |
| 21. | HKm Musus Saiyo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 350 | HL | |
| 22. | HKm Harapan Jaya | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 106 | HL | |
| 23. | Batu Ampar HKm Wana Lestari | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 240 | HL | |
| 24. | HKm KSU Solok Rajo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 3.200 | HL & HPT | |
| 25. | HKm KSU-ED Tabek | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 1.233 | HL | |
| 26. | HKm Aur Serumpun | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 400 | HL | |
| 27. | HKm Leter W | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 404 | HL | |
| 28. | HKm Sialangan | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 444 | HL | |
| 29. | HKm Sungai Tuo | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 360 | HL | |
| 30. | HKm Batu Bapayuang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 77 | HP | |
| 31. | HKm Lurah Basuang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 198 | HP | |
| 32. | HKm Tak Boncah | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 1.117 | HP & HPT | |
| 33. | Batu Badaguak HKm Padang Jariah | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 250 | HL | |
| 34. | HKm Sikayan | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 300 | HL | |
| 35. | Balumuik HKm Simpang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 350 | HL | |
| 36. | Tanjung HKm Sungai Abu | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 260 | HL | |
| 37. | Mandiri HKm Saiyo Sakato | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 4.790 | HL | |
| 38. | HKm Rambaian | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 370 | HL | |
| 39. | Manduang HKm Kubuak | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 288 | HL | |
| 40. | HKm Kampuang | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 127 | HP | |
| 41. | Malayu Saiyo HKm Tetesan Embun | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 603 | HPT | |

| No | Nama Perusahaan/ Pegguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan | | |
|-----|---|--|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Sesuai Izin |
| | 42. HKm Agroforestri Aro Sepakat | Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 112 | HL | |
| 32. | 1. KTH Minang Saiyo, 2. KTH Giat Bersama, 3. KTH Mekar Jaya, 4. KSU Air Bangis | Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | 2.246,89 | Hutan Produksi | Sesuai |
| 33. | 1. KTH Putra Andam 2. KTH Usaha Bersama | Kemitraan | 404 | Hutan Produksi | Sesuai |

Menganalisa Tabel 19 di atas dapat disimpulkan bahwa, pada Tahun 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 172 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat atau turun 1 unit dari Tahun 2020 dimana 2 (dua) unit merupakan perusahaan/pegguna yang legalitas izin usahanya tidak berlaku, yaitu PT Multi Energi Dinamika dan PT Andalas Merapi Timber dan 3 (unit) tambahan dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari. 172 unit/perusahaan tersebut terdiri atas 31 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 3 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 86 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 42 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 2 unit memanfaatkan Kawasan hutan untuk kemitraan. Sebanyak 172 unit/perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut di atas, berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

2. Indikator Nilai PNBK Sektor Kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) " Nilai PNBK Sektor Kehutanan" memiliki target sebesar 85%, terealisasi sebesar 94,29% dengan tingkat capaian 110,93% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula **jumlah realisasi nilai PSDH dan DR dibagi dengan jumlah target nilai PSDH dan DR dibagi angka 100%**. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pengelolaan Hutan. Capaian Target IKU Nilai PNBK Sektor Kehutanan Tahun 2021 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Capaian Target IKU Nilai PNBP Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | | | | Realisasi | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----|---------|-------|--------|--------|
| | | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Terwujudnya Nilai Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | a. Nilai PNBP sektor kehutanan | 20% | 40% | 60% | 85% | 5,32% | 27,00 | 30% | 75% | 55% | 91,00 | 84,29% | 110,99 |

Capaian indikator kinerja “Nilai PNBP Sektor Kehutanan” setiap triwulannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga terealisasi di atas target. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 pemegang izin pemanfaatan hasil hutan telah melakukan kegiatan secara optimal dengan meningkatkan jumlah produksi kayu, meskipun pandemi Covid-19 memaksa pemegang izin untuk melakukan pembatasan aktivitas petugas di lapangan. Hal tersebut juga berdampak terhadap target nasional PNBP Sektor Kehutanan dimana pada Tahun 2021 terdapat pengurangan target sebesar ±24,26% yang akhirnya juga berimbas pada penurunan target PNBP Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat yang semula Rp. 37.550.340.000,- menjadi Rp. 28.406.626.999,87,- dengan realisasi penerimaan PNBP Tahun 2021 sebesar Rp. 26.784.078.095,-.

Pencapaian target kinerja pada indikator ini sudah baik dan sudah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan, diantaranya adalah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan sudah dilakukan pada tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan lebih intensif dan efektif kepada unit pemegang izin pemanfaatan hasil hutan. Hal ini perlu dipertahankan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terutama unit kerja terkait.

Untuk mencapai target kinerja indikator Nilai PNBP Sektor Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada Tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Target dan Realisasi PNBP Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2021

| No | Sumber PNBP | Rasionalisasi Target Nasional | | | Realisasi | | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Produksi (M3) | Penerimaan PNBP (Rp) | | Produksi (M3) | Penerimaan PNBP (Rp) | |
| | | | DR | PSDH | | DR | PSDH |
| A. | Hasil Kayu (Hutan Alam) | | | | | | |
| 1. | PT Salaki Summa Sejahtera | 31.431,75 | 8.047.312.787,75 | 2.663.276.676,21 | 41.049,01 | 8.432.984.956,00 | 2.825.496.330,00 |
| 2. | Minas Pagai Lumber | 34.677,57 | 6.886.234.826,63 | 2.571.047.455,45 | 27.246,84 | 5.595.181.838,00 | 1.871.281.260,00 |
| 3. | Multi Karya Lisun Prima | 10.950,81 | 2.018.599.448,25 | 619.072.851,68 | 8.133,61 | 1.561.487.948,00 | 445.300.350,00 |
| 4. | Dhara Silva Lestari | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | PT Biomass Andalan Energi | 18.251,35 | 3.500.609.169,75 | 1.200.243.283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah A | 95.311,48 | 20.452.756.232,37 | 7.053.640.267,22 | 76.429,46 | 15.589.654.742,00 | 5.142.077.940,00 |
| B. | Hasil Kayu (HTI) | | | | | | |
| 1. | PT Bukit Raya Mudisa | 36.502,70 | 0,00 | 353.755.915,25 | 2.036,07 | 0,00 | 17.102.988,00 |
| | Jumlah B | 36.502,70 | 0,00 | 353.755.915,25 | 2.036,07 | 0,00 | 17.102.988,00 |
| C. | Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) | 1.460,11 | 255.518.767,50 | 74.962.562,99 | | | |
| D. | Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.231,38 | 4.196.941.633,00 | 1.719.946.100,00 |
| | Jumlah C + D | 1.460,11 | 255.518.767,50 | 74.962.562,99 | 403.231,38 | 4.196.941.633,00 | 1.719.946.100,00 |
| E. | Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | | |
| 1. | Getah Pinus | 759,26 | 0,00 | 36.790.615,19 | 1.603,50 | 0,00 | 59.051.328,00 |
| 2. | Sarang Burung Walet | 1.095,08 | 0,00 | 75.804.838,98 | 250,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 3. | Rotan (Manau, Mawi, Tabu-tabu) | 423.431,35 | 0,00 | 87.933.613,22 | 892.104,00 | 0,00 | 95.516.820,00 |
| 4. | Rotan Segi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 609.600,00 |
| 5. | Getah Karet | 87,61 | 0,00 | 15.160.967,80 | 63,30 | 0,00 | 9.493.500,00 |
| | Lain-lain | 87,61 | 0,00 | 303.219,36 | 6,80 | 0,00 | 1.429.080,00 |
| | Jumlah E | | 0,00 | 215.993.254,54 | 894.036,80 | 0,00 | 118.354.692,00 |
| | TOTAL | | 20.708.274.999,87 | 7.698.352.000,00 | 1.375.733,71 | 19.786.596.375,00 | 6.997.481.720,00 |
| | Σ PSDH + DR | | | 28.406.626.999,87 | | | 26.784.078.095,00 |
| | PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN (%) | | | | | | 94,29 |

Dari Tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa, pada Tahun 2021, realisasi PNBP terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 94,29% atau naik 11,33% dari tahun sebelumnya (82,96%). Realisasi nilai PNBP sektor kehutanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi nilai PSDH+DR}}{\text{Target nilai PSDH+DR}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rp } 19.786.596.375,00 + \text{Rp } 6.997.481.720,00}{\text{Rp } 20.708.274.999,87 + \text{Rp } 7.698.352.000,00} \times 100\% = 94,29\%$$

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan namun tidak sampai mempengaruhi capaian indikator kinerja utama karena telah dilakukan mitigasi dan penerapan solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut.

Faktor penyebab kegagalan/permasalahan:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
2. Masih kurangnya partisipasi perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Masih terbatasnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal-areal konsesi.
4. Adanya konflik antara pemegang konsesi usaha dengan masyarakat sehingga target RKT tidak optimal terpenuhi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Melakukan peningkatan pengetahuan dan informasi melalui sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat maupun perusahaan;
2. Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota dengan meningkatkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai UPTD Dinas Kehutanan yang berlokus di Kabupaten/Kota.
4. Optimalisasi PNBPN melalui rasionalisasi target PNBPN sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat sesuai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka relaksasi kebijakan fiskal nasional.
5. Resolusi konflik dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar konsesi melalui pelibatan aktif baik masyarakat maupun lembaga masyarakat.

Keberhasilan pencapaian Sasaran I “Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan” ini ditunjang dengan satu program Pengelolaan Hutan dengan pembiayaan APBD, yaitu:

- A. Program Pengelolaan Hutan dengan 4 Kegiatan dan 8 sub kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
 2. Pembagian Blok Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
4. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
6. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
7. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan
8. Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya

Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja sub kegiatan yang dapat tercermin dari Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | (%) | | | |
|----|---|---|---------------------------|----------|---|--------|---|-----------|---|---------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. | Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | Program Pengelolaan Hutan | 1 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi | 1 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | - | Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan | 1 Buku | 1 Buku | 100 |
| | | | | | | 2 | Pembagian Blok Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | - | Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan | 10 Km | 10 Km | 100 |
| | | | | | | 3 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH | - | Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH (DBH DR) | 18 Unit | 8 Unit | 44,4 |
| | | | | 2 | Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | - | Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalika n di wilayah kelola KPH Agam Raya | 3 unit | 3 unit | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | (%) |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|--|--------|-----------|-----|
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Dhamasraya | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Lima puluh kota | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola Mentawai | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Pasaman Raya | 4 unit | 4 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Sijunjung | 2 unit | 2 unit | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | (%) | |
|-----|-------------------|---|---------|---|--|--|---|--------------------------|----------|-----|
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalika n di wilayah kelola KPH Solok | 4 unit | 4 unit | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalika n di wilayah kelola KPH Bukit Barisan | 8 unit | 8 unit | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan | 40 Kali | 40 Kali | 100 | |
| | | | | | 2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | - Tersedianya data neraca sumber daya hutan dan Jumlah Data dan Informasi Kehutanan yang dikembangkan | 1 Buku | 1 Buku | 100 | |
| | | | | | | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | - Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan KPH (DBH DR) | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | 3 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | - Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun | 1 Buku / 11 Lokasi | 1 Buku / 11 Lokasi | 100 | |
| | | b . Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan (%) | | 1 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 1 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan | - Pelaksanaan dan / atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu atau jasa lingkungan (DBH DR) | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 | |
| | | | | | | - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH DR) | 10 Dokumen / Rekomendasi | 10 Dokumen / Rekomendasi | 100 | |

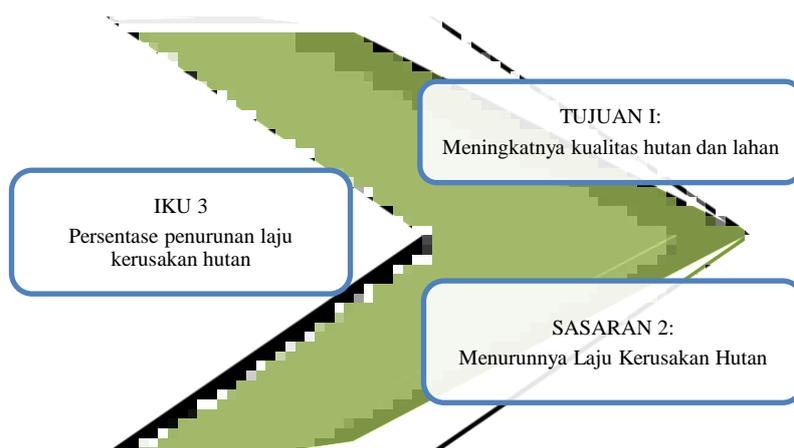
| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | (%) |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|--|--|--|------------|------------|-----|
| | | | | 2 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | 1 Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dhamasraya yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | (%) |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|--|-------------|-------------|-----|
| | | | | | | - Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola | 1 komoditi | 1 komoditi | 100 |
| | | | | | | - Temu Usha Pengembangan HHBK | 10 Komoditi | 10 Komoditi | 100 |

Sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja rendah pada dukungan sasaran strategis I ini adalah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH yaitu hanya mencapai 44,44% (dari 18 unit terealisasi 8 unit). Sub kegiatan tersebut merupakan capaian indikator yang dibiayai menggunakan dana DBH-DR. Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh pengadaan laptop pendukung pemetaan drone pada KPH yang sampai dengan akhir tahun tidak terdapat spesifikasi yang sesuai pada e-katalog pengadaan, sehingga diputuskan untuk tidak dilaksanakan, mengingat laptop untuk pemetaan drone membutuhkan spesifikasi khusus.

II. Menurunnya Laju Kerusakan Hutan

Sasaran Strategis 2 yaitu **Menurunnya Laju Kerusakan Hutan**, diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3

Guna Optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan

luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas \pm 2.286.883,10 Ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 Ha artinya 27,58% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis seluas 630.695 Ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut dengan menurunkan laju kerusakan hutan. Laju kerusakan hutan diturunkan melalui berbagai upaya diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis, menurunkan titik panas (*hotspot*) serta perlindungan dan pengamanan hutan.

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2021

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---------------------------------|---|--------|-----------|---------------|
| 1 | Menurunnya Laju Kerusakan Hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% | 19,75% | 131,67 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) | | | | | 131,67 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2021 berhasil dicapai dengan rata-rata capaian sasaran adalah 131,67%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didorong oleh progresifnya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam lima tahun terakhir dibuktikan dengan menurunnya laju kerusakan hutan dalam dua tahun terakhir sebesar 14,73% pada Tahun 2020 dan 19,75% pada Tahun 2021 dari laju kerusakan hutan pada Tahun 2016 yang dijadikan *baseline* untuk penghitungan laju kerusakan hutan hingga Tahun 2021.

Sasaran kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan, sebagai contoh kebakaran hutan merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kerusakan hutan secara cepat dan tanpa dapat dikontrol dalam perencanaan karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim yang saat ini sangat ekstrim. Kebakaran hutan yang luas akan

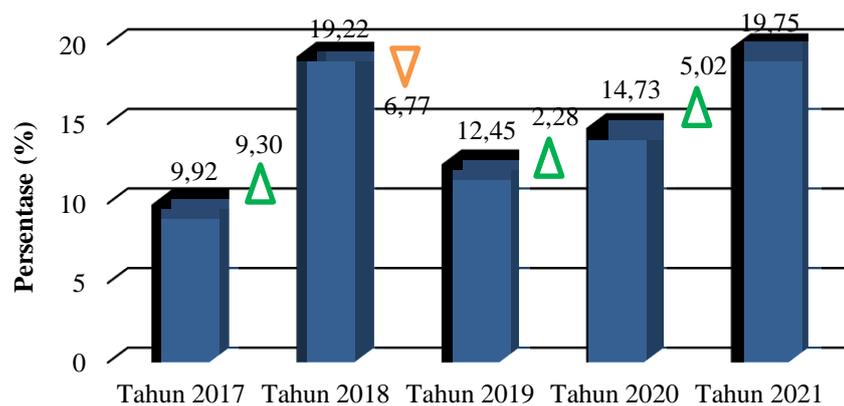
sangat mempengaruhi laju kerusakan hutan disamping variabel lainnya seperti perambahan, *illegal logging*, dan perladangan.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2021 dan Tahun 2020

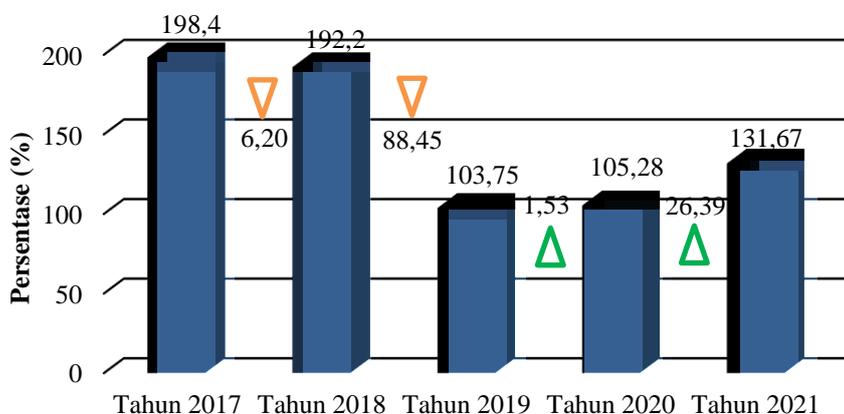
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2021 | Target 2020 | Tahun 2021 (n) | | Tahun 2020 (n-1) | |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi | Capaian (%) |
| Menurunnya Laju Kerusakan Hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% | 14% | 19,75% | 131,67 | 14,73% | 105,28 |

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indikator Kinerja 3 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan dapat direalisasikan 19,75% (12.037 Ha) atau naik sebesar 5,02% dari realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan laju kerusakan hutan dapat ditekan lebih rendah dari *baseline* Tahun 2016 (15.000 Ha).

Capaian kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2021.



Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2021.

Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 terjadi kenaikan angka persentase penurunan laju kerusakan hutan dari 9,92% menjadi 19,22% namun pada capaian kinerja terjadi penurunan capaian target kinerja dari 198,40% pada Tahun 2017 dan menjadi 192,20% pada Tahun 2018, hal terjadi dikarenakan pada Tahun 2018 target penurunan adalah 10% sehingga angka 19,22% berupa capaian kinerja sebesar 192,20%, kondisi ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017 turun sebesar 6,20%. Tahun 2019 laju kerusakan hutan turun, dari 19,22% pada Tahun 2018 menjadi 12,45% pada Tahun 2019, kembali naik menjadi 14,73 pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021 naik 5,02% menjadi 19,75%. Kehilangan tutupan hutan tersebut merupakan keniscayaan yang disebabkan oleh berbagai sebab antara lain penebangan terencana (RKT IUPHHK HA/HTI), izin pinjam pakai kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, pembukaan hutan menjadi perladangan dan perkebunan, meluasnya permukiman masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan serta bencana alam. Namun dibandingkan angka laju kerusakan hutan Tahun 2016 (base line) laju kerusakan hutan di Tahun 2021 masih jauh lebih rendah.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target Akhir RPJMD/ Renstra | Realisasi 2020 | Tingkat Kemajuan (%) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Menurunnya laju kerusakan hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% | 19,75% | 131,67 |

Mencermati indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan”, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target tahun kelima maka realisasi 19,75% dengan tingkat kemajuan 131,67% telah melampaui target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Artinya, hingga akhir target RPJMD dan/Renstra tersebut laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, penanaman dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Ket |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | Sumbar 2021 | Sumbar 2020 | KemenLHK 2020 | |
| Menurunnya Laju Kerusakan Hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 19,75% | 14,73% | 75.00% | Lebih Rendah |

Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja 3 yaitu “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka deforestasi Indonesia Tahun 2012-2020 sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

| Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Angka Deforestasi Indonesia (x 1000 Ha) | 610 | 730 | 400 | 1.090 | 630 | 480 | 440 | 470 | 120 |

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laju deforestasi di Indonesia pada Tahun 2020 (n-1) mengalami penurunan sebesar 75%. Jika menggunakan metode penghitungan yang sama dengan penghitungan persentase penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat dimana yang dijadikan baseline adalah rata-rata angka deforestasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 yaitu 692.000 Ha/Tahun, maka penurunan laju kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan rata-rata deforestasi Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah 82,66%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan pemerintah pusat memiliki sumber daya, baik SDM maupun pendanaan yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga hutan, selain juga peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melindungi hutan dari ancaman deforestasi. Angka deforestasi Indonesia ini didapatkan dari deforestasi bruto yang merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, dikurangi dengan perubahan kondisi tak berhutan menjadi berhutan (reforestasi). Perbaikan tutupan hutan dan lahan tersebut telah menyumbangkan indeks tutupan hutan dan lahan.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Kerusakan Hutan dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Capaian Realisasi Tahun 2021 | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|------|-------|
| | | Sumbar | Riau | Jambi |
| Menurunnya Laju Kerusakan Hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 131,67% | - | - |

Dari Tabel 26 terlihat bahwa dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran “Menurunnya Laju Kerusakan Hutan” tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Provinsi Riau menggunakan Indeks Tutupan Lahan sebagai Indikator

Kinerja Sasaran dengan target 58,09 dan realisasi 50,33 atau senilai 86,64%. Jika dibandingkan dengan Indeks Tutupan Lahan pada Provinsi Sumatera Barat, maka Sumatera Barat memiliki Indeks Tutupan Lahan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau yaitu 64,20. Hal ini menandakan bahwa tutupan hutan di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong bagus dibandingkan luas daratannya. Sedangkan di Provinsi Jambi menggunakan IKU Persentase Penurunan Luas Kawasan Hutan dan Lahan terbakar dengan target 5% pada tahun 2021.

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" memiliki target sebesar 15%, terealisasi sebesar 19,75% dengan tingkat capaian 131,67% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator kinerja tersebut di atas diukur dengan menghitung dengan formula (**laju kerusakan hutan Tahun n - laju kerusakan Tahun 2016 (data base)/laju kerusakan hutan Tahun 2016 (data base) x 100%**). Dari perubahan tutupan lahan Tahun 2016 dan Tahun 2021 diperoleh kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 60.184 Ha dalam 5 (lima) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 12.037 Ha/Tahun. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan Tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 Ha/Tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga Tahun 2021.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan Tahun 2021 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 27.

Tabel 27. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | | | | Realisasi | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|---------|--------|-----------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|--------|
| | | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Menurunnya laju kerusakan hutan | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 19,75% | 131,67 |

Capaian indikator tersebut di atas pada setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti penanaman, patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan Tahun 2017 hingga Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 28.

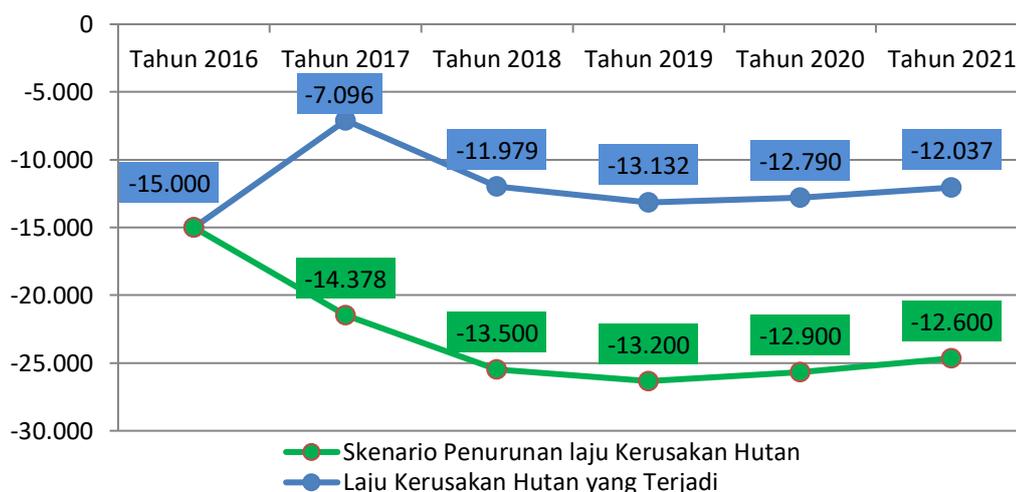
Tabel 28. Tutupan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2021

| No | Kabupaten | Luas TH 2017 | Deforestasi 2018 | Luas TH 2018 | Deforestasi 2019 | Luas TH 2019 | Deforestasi 2020 | Luas TH 2020 | Deforestasi 2021 | Luas Tutupan Hutan 2021 |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Kab. Agam | 56.657 | 206 | 56.451 | 169 | 56.282 | 58,605 | 56.223 | 176 | 56.047 |
| 2 | Kab. Dharmasraya | 57.214 | 3.528 | 53.686 | 1.903 | 51.782 | 1430,538 | 50.352 | 1.710 | 48.642 |
| 3 | Kab. Lima Puluh Kota | 125.100 | 1.048 | 124.052 | 625 | 123.427 | 275,887 | 123.151 | 455 | 122.696 |
| 4 | Kab. Mentawai | 464.363 | 913 | 463.450 | 790 | 462.660 | 2649,287 | 460.010 | 1.180 | 458.831 |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | 26.288 | 126 | 26.162 | 158 | 26.005 | 75,984 | 25.929 | 164 | 25.764 |
| 6 | Kab. Pasaman | 217.869 | 886 | 216.984 | 1.349 | 215.635 | 845,616 | 214.789 | 623 | 214.167 |
| 7 | Kab. Pasaman Barat | 75.958 | 637 | 75.321 | 4.361 | 70.959 | 764,613 | 70.195 | 673 | 69.521 |
| 8 | Kab. Pesisir Selatan | 311.659 | 3.020 | 308.639 | 2.276 | 306.362 | 2178,047 | 304.184 | 312 | 303.872 |
| 9 | Kab. Sijunjung | 128.713 | 242 | 128.471 | 2.144 | 126.327 | 1362,765 | 124.965 | 2.389 | 122.576 |
| 10 | Kab. Solok | 172.203 | 408 | 171.796 | 524 | 171.271 | 553,884 | 170.717 | 509 | 170.209 |
| 11 | Kab. Solok Selatan | 200.022 | 4.767 | 195.255 | 837 | 194.418 | 1382,887 | 193.035 | 426 | 192.609 |
| 12 | Kab. Tanah Datar | 42.383 | 11 | 42.372 | 62 | 42.310 | 55,528 | 42.254 | 174 | 42.080 |
| 13 | Kota Padang | 32.794 | 1.069 | 31.725 | 185 | 31.541 | 106,744 | 31.434 | 166 | 31.267 |
| 14 | Kota Padang Panjang | 354 | - | 354 | 33 | 321 | 12,909 | 308 | 12 | 296 |
| 15 | Kota Payakumbuh | 198 | - | 198 | - | 198 | - | 198 | 1 | 196 |
| 16 | Kota Sawahlunto | 2.325 | - | 2.325 | 19 | 2.306 | 5,851 | 2.300 | 26 | 2.274 |
| 17 | Kota Solok | 949 | - | 949 | 4 | 945 | 5,218 | 940 | 25 | 915 |
| | Luas Total | 1.915.050 | 16.861 | 1.898.189 | 15.440 | 1.882.749 | 11.764 | 1.870.984 | 9.022 | 1.861.962 |

Catatan: TH = Tutupan Hutan; Deforestasi = perubahan dari Tutupan Hutan menjadi Non Hutan

Sumber: Hasil penghitungan Tim Penghitung Laju Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 28 di atas dapat dilihat bahwa, deforestasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 9.022 Ha dengan laju kerusakan hutan sebesar 12.037 Ha/Tahun ((1.922.146 Ha - 1.861.962 Ha)/5 Tahun). Jika dicermati dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi areal terbangun (pada wilayah izin IUPHHK HA/HTI), areal terbangun (jalan dan perumahan), semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat akibat adanya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans mentawai serta meningkatnya areal terbangun (jalan dan perumahan). Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan meningkatnya aktivitas budidaya pertanian lahan kering dan perkebunan. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Sijunjung disebabkan adanya areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat dan perambahan. Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan skenario target penurunan laju kerusakan hutan dengan laju kerusakan hutan yang terjadi (ha/tahun)

Berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2016 dan 2021, laju kerusakan hutan pada Tahun 2021 adalah 12.037 Ha/Tahun atau mengalami penurunan dari angka 15.000 pada Tahun 2016 (*base line*). Artinya pada Tahun 2021, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi non hutan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari Tahun 2016 (*base line*). Menurunnya laju kerusakan hutan pada Tahun 2021 dibandingkan dengan laju kerusakan hutan Tahun 2016 (*base line*) merupakan hasil positif terhadap upaya mitigasi untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal, perambahan, kebakaran hutan dan lahan serta okupasi masyarakat. Hal lain yang ikut mendukung capaian indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” adalah:

- ✓ Pemulihan lahan kritis melalui kegiatan penanaman dan kegiatan pendukung lainnya. Keberhasilan penanaman yang berkontribusi dalam menurunkan lahan kritis adalah penanaman yang dilakukan pada Tahun 2016. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5

| No | Nama Kegiatan | Lokasi | | Luas (Ha) | Persentase Tumbuh (%) |
|----|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | Nagari | Kabupaten | | |
| 1 | Reboisasi | Sungai Nyalo Mudiak Aia | Pesisir Selatan | 180 | 77,55 |
| 2 | Hutan Rakyat | Bukit Siayah Lumpo | Pesisir Selatan | 7 | 87,67 |
| 3 | Hutan Rakyat | Duku | Pesisir Selatan | 6 | 80,14 |
| 4 | Hutan Rakyat | Tanjung Sani | Agam | 50 | 75,36 |
| 5 | Hutan Rakyat | Koto Malintang | Agam | 50 | 51,44 |

| No | Nama Kegiatan | Lokasi | | Luas (Ha) | Persentase Tumbuh (%) |
|----|--------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| | | Nagari | Kabupaten | | |
| 6 | Reboisasi | Silungkang | Agam | 100 | 75,20 |
| 7 | Hutan Rakyat | Baringin | Agam | 50 | 56,64 |
| 8 | Agroforestry | Kamang Mudiak | Agam | 10 | 76,80 |
| 9 | KBR | Kamang Mudiak | Agam | 40 | 73,70 |
| 10 | Hutan Rakyat | Simarasok | Agam | 20 | 76,40 |
| 11 | Reboisasi | Sibakur | Sijunjung | 55 | 69,86 |
| 12 | Hutan Rakyat | Sungai Betung | Sijunjung | 45 | 75,09 |
| 13 | Reboisasi | Rangkiang Luluih | Solok | 200 | 21,75 |
| 14 | Reboisasi | Sirukam | Solok | 200 | 39,40 |
| | Jumlah (Ha) | | | 1.013 | |

Dari table tersebut terlihat bahwa keberhasilan penanaman pada Tahun 2016 seluas 1.013 Ha, dimana dikatakan berhasil karena jumlah tanaman baru dan tanaman asal lebih dari 700 batang per hektar. Artinya, hasil penanaman Tahun 2016 telah memberikan sumbangan pada penambahan penutupan hutan Tahun 2021 (hutan sekunder) seluas 1.013 Ha. Dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh per hektar sampai Tahun 2021, maka hasil penanaman selama lima tahun lalu dapat mengurangi luas lahan kritis.

✓ **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan.**

Melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2021 juga telah berhasil membentuk 148 kelompok LMPHBN yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang terdiri atas 450 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2021 di Sumatera Barat

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | TAHUN 2021 | |
|-----|--------------------|---------------|---------------------|
| | | JUMLAH NAGARI | JUMLAH SATGAS (ORG) |
| 1. | Solok Selatan | 13 | 30 |
| 2. | Solok | 15 | 50 |
| 3. | Kepulauan Mentawai | - | - |
| 4. | Padang Pariaman | 8 | 25 |
| 5. | Lima Puluh Kota | 14 | 54 |
| 6. | Agam | 13 | 41 |

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | TAHUN 2021 | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|
| | | JUMLAH NAGARI | JUMLAH SATGAS (ORG) |
| 7. | Pesisir Selatan | 18 | 49 |
| 8. | Sijunjung | 11 | 45 |
| 9. | Pasaman | 11 | 33 |
| 10. | Tanah Datar | 6 | 20 |
| 11. | Pasaman Barat | 9 | 27 |
| 12. | Sawahlunto | 4 | 12 |
| 13. | Dharmasraya | 15 | 45 |
| 14. | Kota Solok | 4 | 11 |
| 15. | Kota Padang | 7 | 8 |
| | JUMLAH | 148 | 450 |

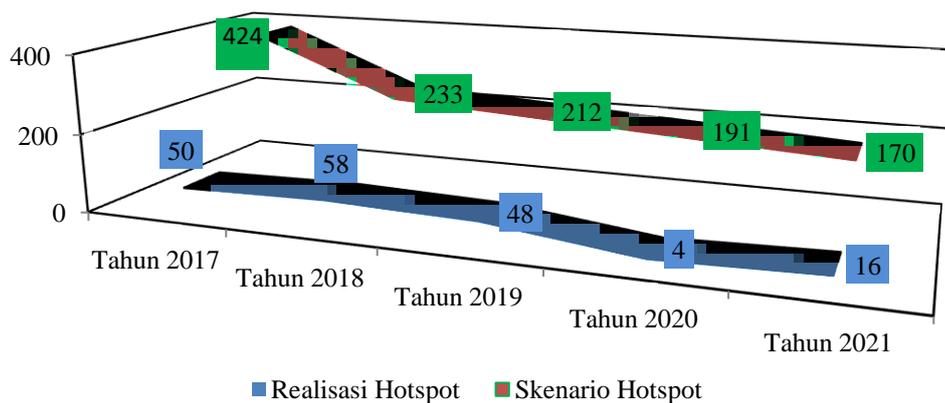
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Pada Tahun 2020, anggota LMPHBN tidak mendapatkan fasilitasi bantuan insentif untuk penguatan kelembagaan PHBN karena keterbatasan anggaran pada tahun tersebut. Namun pada Tahun 2021 insentif kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Lembaga Masyarakat ini sudah tersistem dan terstruktur dengan baik di lingkup nagari dengan pembinaan yang intensif dari polisi kehutanan, sehingga kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjalin koordinasi, komunikasi dan penyampaian informasi terkait kejadian perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah nagari masing-masing sehingga upaya perlindungan hutan masih dapat berperan aktif dalam mengantisipasi peningkatan tindak pidana bidang kehutanan demi menjaga fungsi dan keberadaan hutan secara lestari.

✓ **Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*).**

Pada Tahun 2021, jumlah *hotspot* yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tergolong sangat rendah dari pada skenario yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah *hotspot* merupakan hasil dari mitigasi, pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) Provinsi Sumatera Barat maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh iklim dan curah hujan juga mempengaruhi capaian indikator kinerja ini. Koordinasi juga dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim di sektor

kehutanan. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota serta provinsi tetangga berupaya menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan titik api (*hotspot*) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan titik panas (*hotspot*) dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata titik panas (*hotspot*) Tahun 2011-2015. Selanjutnya ditetapkan target indikator kinerja yaitu penurunan titik panas (*hotspot*) sebanyak 5% pada Tahun 2016, 10% pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 target dinaikkan menjadi 45%, 50% untuk Tahun 2019, 55% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar 60% atau setara dengan penurunan titik panas 21 titik. Sehingga didapatlah angka toleransi titik panas (*hotspot*) dalam bentuk skenario seperti Gambar 11.



Gambar 11. Skenario dan Realisasi *Hotspot* Tahun 2017 – 2021

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan namun tidak sampai mempengaruhi capaian indikator kinerja utama karena telah dilakukan mitigasi dan penerapan solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut.

Faktor penyebab kegagalan/permasalahan:

1. Terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penyelesaian kasus pidana kehutanan tidak bisa ditangani secara komprehensif;
2. Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kejahatan kehutanan (perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan);
3. Pemberdayaan anggota LMPHBN belum optimal menjangkau seluruh nigari di sekitar/di dalam Kawasan hutan sehingga peran serta dalam perlindungan dan pengamanan hutan masih belum maksimal;
4. Titik api (*Hotspot*) yang terdapat di luar kawasan hutan kebanyakan disebabkan oleh pembakaran lahan budidaya, sementara partisipasi para pihak di daerah (kabupaten/kota/provinsi tetangga) belum maksimal menjangkau sampai ke tingkat nagari/desa.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Mengusulkan penambahan jumlah PPNS;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran dibidang kejahatan kehutanan;
3. Menjadikan anggota LMPHBN sebagai tenaga perlindungan dan pengamanan hutan dengan tupoksi melengkapi tenaga Polisi Kehutanan;
4. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pencapaian sasaran strategis pada indikator kinerja utama tersebut didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya sebagaimana berikut:

- A. Program Pengelolaan DAS yang terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
 1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
- B. Program Pengelolaan Hutan yang terdiri atas 9 sub kegiatan
 1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
 2. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
 3. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (DAK)
 5. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
 6. Perbenihan Tanaman Hutan
 7. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit

8. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 9. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- C. Program Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya yang terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
1. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Seluruh kegiatan capaian kinerjanya cukup baik, namun ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya tidak mencapai angka 100%, hal ini disebabkan karena ada kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat situasional. Kegiatan bersifat situasional artinya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tergantung pada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Indikator kinerja sub kegiatan yang capaiannya rendah adalah pada indikator umlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yaitu dari target 25 kali hanya terealisasi 19 kali atau 75%.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan tersebut. Tidak optimalnya capaian kinerja kegiatan tersebut bukan berarti kesalahan dalam perencanaan tetapi merupakan keberhasilan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan (pre-emptif dan preventif) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta semakin baiknya sarana dan prasarana dalam deteksi dini serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat tercermin dari realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap yang dapat dilihat dari Tabel 31.

Tabel 31. Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Menurunnya laju kerusakan hutan Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | Menurunnya laju kerusakan hutan | a. Persentase penurunan laju kerusakan hutan | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | - Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun | 2 DAS | 2 DAS | 100 |
| | | | | | | - Penanaman dan/ atau pengayaan (Pembuatan PUP) / Litbang | 1 Ha | 1 Ha | 100 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | - Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 | 20 lokasi | 20 lokasi | 100 |
| | | | | | | 2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | - Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan | 723 Ha |
| | | | 2. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (DAK) | - Terbangunnya sipil teknis kehutanan pada wilayah KPH | 40 Unit | | | 40 Unit | 100 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | - Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik | 2 unit | 2 unit |
| | | | - Jumlah bibit yang berkualitas | | | | 250.000 batang | 250.000 batang | 100 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 1. Perbenihan Tanaman Hutan | 1. Perbenihan Tanaman Hutan | - Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH-DR) | 10 Sertifikat | 10 Sertifikat | 100 |
| | | | | | | 2. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit | - Pembinaan perbenihan tanaman hutan | 6 PPTH | 6 PPTH |
| | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN | 1. Pengelolaan Kawasan Bermilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga | 1. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bermilai Ekosistem Penting | - Terbentuknya kawasan ekosistem esensial | 1 unit | 1 unit | 100 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|--------|--|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | EKOSISTEM NYA | Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Kewenangan Daerah Provinsi | - | Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang difasilitasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | | | - | Terbangunnya sarpras wisata pada wilayah KPH | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 1 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | - | Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam | 450 orang | 450 orang | 100 |
| | | | | | | - | Peta laju kerusakan hutan | 6 peta | 6 peta | 100 |
| | | | | | | - | Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti | 2 kasus | 2 kasus | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - | Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan | 15 kali | 15 kali | 100 |

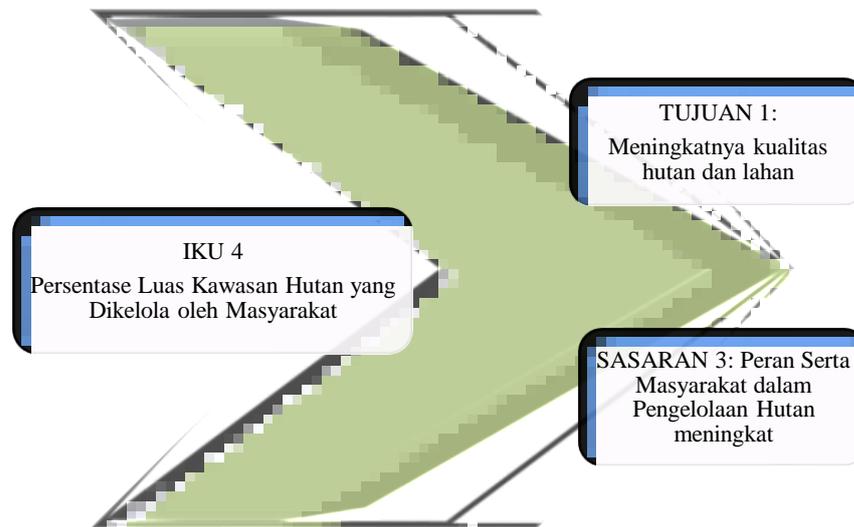
| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|---|----------|-----------|-----|
| | | | | | | - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Sijunjung | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan | 15 kali | 15 kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota | 15 Kali | 15 Kali | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| | | | | | | - wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonsevasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| | | | | | | - Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|---|--|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | - Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan | 1 lap | 1 lap | 100 |
| | | | | | | - Tersedianya data simpanan karbon | 20 Petak | 20 Petak | 100 |
| | | | | | | - Patroli Pengamanan (Sosialisasi, Koordinasi, Patroli) (DBH-DR) | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 100 |
| | | | | | 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dhamasraya | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian | 8 Kali | 8 Kali | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | | kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan | | | |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok | 8 Kali | 8 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan | 25 Kali | 19 kali | 76,0 |
| | | | | | | - Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 15 Kali | 15 Kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 60 Orang | 60 Orang | 100 |
| | | | | | | - Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 50 Desa | 50 Desa | 100 |
| | | | | | | - Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan | 18 kali | 18 kali | 100 |
| | | | | | | - Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 39 Kegiatan | 39 Kegiatan | 100 |

III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Pencapaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2021

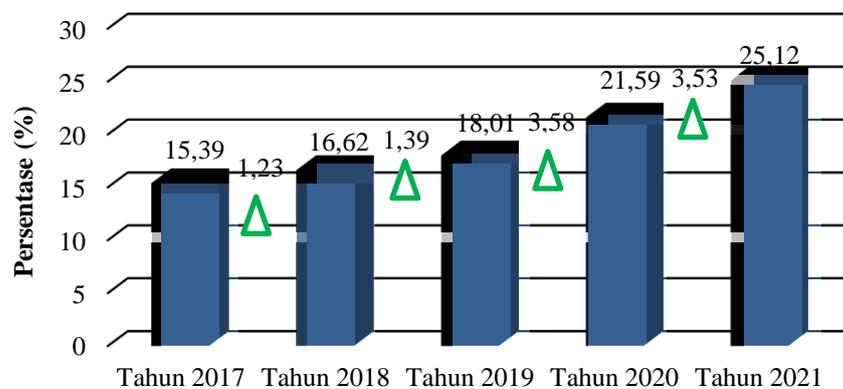
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| 1. | Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21 | 25,12 | 118,43 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) | | | | | 118,43 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 3 pada Tahun 2021 berhasil dicapai, dimana rata-rata capaian sasaran adalah 118,43% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 25,12% di atas adalah usulan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, HKm, dan HN pada Tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan.

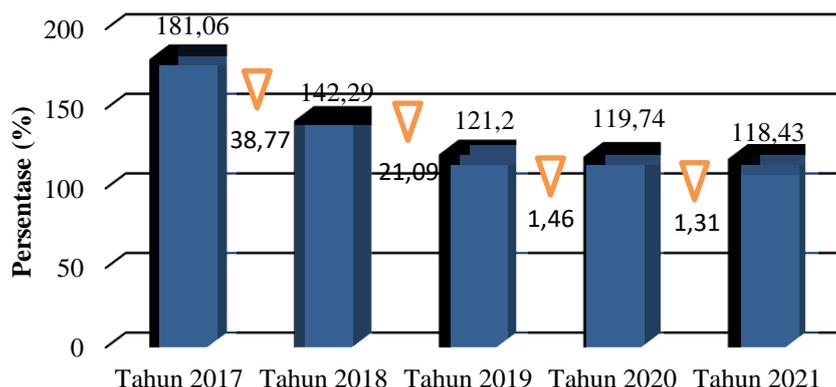
Tabel 33. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2021 | Target 2010 | Tahun 2021 (n) | | Tahun 2020 (n-1) | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | Realisasi (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21% | 18,03% | 25,12 | 118,43 | 21,59 | 119,74 |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” pada Tahun 2021 meningkat 3,53% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2020. Capaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (%) Tahun 2017-2021



Gambar 14. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (5) Tahun 2017-2021

Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target Akhir RPJMD/ Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan (%) |
|---|---|-----------------------------|-----------|----------------------|
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21% | 25,12 % | 118,43 |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat” pada Tahun 2021 telah mendukung bahkan melampaui capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan/atau Renstra yaitu sebesar 118,43%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kemajuan hasil pada sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” cukup signifikan sehingga melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | % Capaian Realisasi Tahun 2021 dan 2020 | | | Ket |
|---|---|---|-------------|---------------|--------------|
| | | Sumbar 2021 | Sumbar 2020 | KemenLHK 2021 | |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 118,43 | 119,74 | 157,00 | lebih rendah |

Dari Tabel 35 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator di atas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan pada Tahun 2021 menargetkan 250.000 Ha wilayah Kelola masyarakat melalui perhutanan sosial dengan capaian 393.530,82 Ha atau setara 157%. Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah, yaitu dengan adanya Perhutanan Sosial. Diakhir Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang sebagian besar kehidupannya tergantung pada hutan. Kinerja Perhutanan Sosial se-Indonesia pada Tahun 2021 adalah kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 4.807.825,97 Ha.

Lima skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. dibandingkan dengan jumlah luas hutan lindung dan hutan produksi Indonesia sekitar 98.498.522,73 Ha, maka diketahui bahwa persentase luas hutan Indonesia yang dikelola oleh masyarakat adalah 4,88%. Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 1.521.260Ha dan luas hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat seluas 382.199 Ha, maka persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 25,12%. Keberhasilan Sumatera Barat tersebut sangat berkontribusi pada pencapaian target tingkat nasional.

Tabel 36. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Capaian Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|------------------------------|------|-------|
| | | Sumbar | Riau | Jambi |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 118,43% | - | - |

Dari Tabel 36 dapat dilihat, capaian indikator kinerja tersebut tidak menjadi indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Jika membandingkan data, luas usulan hutan Kelola masyarakat melalui perhutanan sosial di Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2021 mencapai 68.331 Ha. Jika dibandingkan dengan jumlah Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Lindung 179.588 Ha, Hutan Produksi Terbatas 258.285 Ha, Hutan Produksi 963.792 Ha dan Hutan Produksi Konversi 11.399 Ha) seluas 1.413.064 Ha, maka capaian luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di Provinsi Jambi mencapai 4,84%. Realisasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat 25,12% atau setara dengan capaian realisasi 118,43%.

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” memiliki target sebesar 21,21%, terealisasi sebesar 25,12% dengan tingkat capaian 118,43% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja Utama “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” dihitung dengan formula **luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Sumatera Barat dikalikan angka 100%.**

Capaian Target IKU “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” Tahun 2020 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 37.

Tabel 37. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target (%) | | | | Realisasi (%) | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | Capaian | TRW II | Capaian | TRW III | Capaian | TRW IV | Capaian |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan | Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat | 5 | 11,68 | 20 | 21,21 | 14,37 | 287 | 16,45 | 141 | 20 | 100 | 25,12 | 118,43 |

Dari Tabel 37 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HN, HTR dan HKm dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat/Kemitraan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan serta Pengendalian PHBM.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar

Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

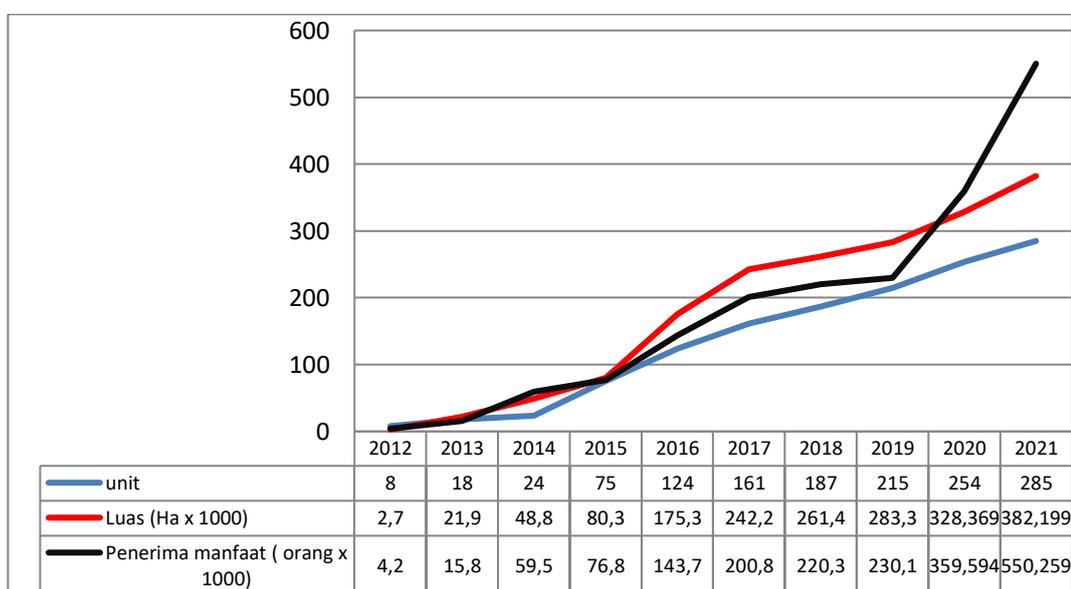
| No | SKEMA | PROGRES | | | | | | | | Total (Unit/Ha) |
|----|----------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|------------------------------|
| | | Usulan | | Verifikasi | | PAK* | | HPHD/ IUPH | | |
| | | Unit | Luas (ha) | Unit | Luas (ha) | unit | Luas (ha) | Unit | Luas (ha) | |
| 1 | Hutan Nagari | 57 | 97.403 | 1 | 1.018 | 0 | 0 | 102 | 187.873,00 | 160 286.294 |
| 2 | Hutan Kemasyarakatan | 20 | 10.625 | 3 | 5.900 | 4 | 2.814 | 46 | 29.239,00 | 73 48.578 |
| 3 | Hutan Tanaman Rakyat | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 4 | 6.935,00 | 6 7.735 |
| 4 | Kemitraan Kehutanan | 23 | 12.115 | 1 | 202 | 0 | 0 | 3 | 435,08 | 27 12.752 |
| 5 | Hutan Adat** | 14 | 19.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.942,00 | 19 26.840 |
| | TOTAL*** | 114 | 140.041 | 7 | 7.920 | 4 | 2.814 | 160 | 231.424 | 285 382.199 |

Catatan: * PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung awal 2017 sudah tidak ada lagi.

**HA= Hutan adat

***Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

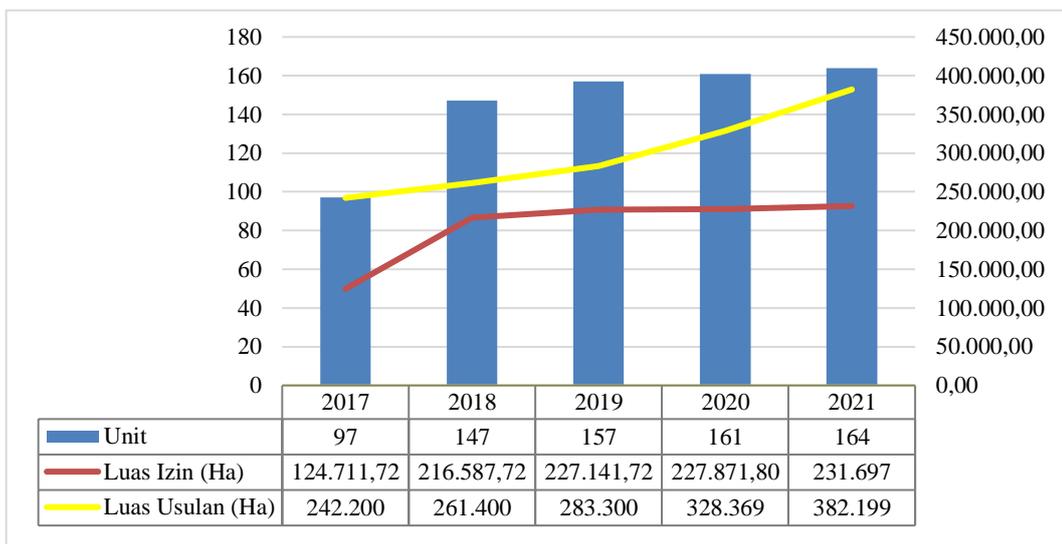
Tabel 38 di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan progres kurun waktu sepuluh tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 15.



Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Sepuluh Tahun Terakhir

Dari Gambar 15 di atas terlihat perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif

dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada. Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping inividu/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait, yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 16. Perbandingan Luas Izin dan Luas Usulan skema Perhutanan Sosial

Luas izin perhutanan sosial di Sumatera Barat saat ini mencapai 231.697 Ha atau mencapai 60,62% dari usulan skema perhutanan sosial, menyisakan 150.502 Ha untuk di proses izinnya oleh Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui upaya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait percepatan penerbitan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya, Faktor pendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Tahun 2021 tersebut adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, *workshop*

fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (HHBK). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

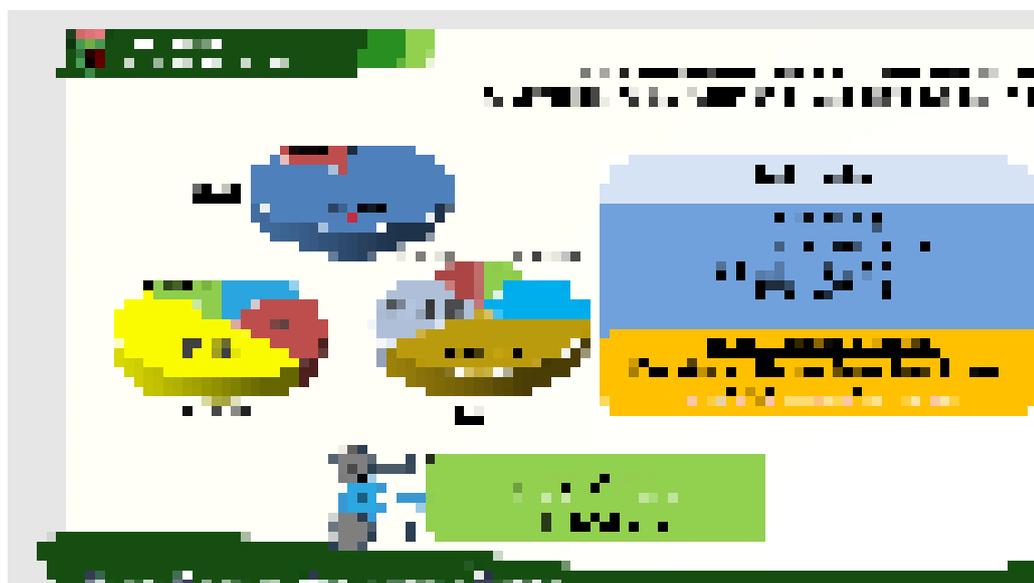
1. Studi pengembangan HKM KPSU Solok Radjo Nagari Aie Dingin Kabupaten Solok, memperoleh pendapatan dari usaha dari sewa ATV, tenda glamping dan kedai kopi. Pendapatan rerata setiap bulan mencapai 5 juta – 10 juta rupiah. Pendapatan ini masih bisa ditingkatkan dengan penambahan sarana prasarana ekowisata dan unit ekonomi produktif pengolahan kopi.
2. Studi pendapatan di HKm Suka Menang Air Kacang Kabupaten Pasaman Barat mampu memproduksi gula aren 26.000 Kg/tahun dan gula semut aren 480 Kg/tahun dengan pendapatan per tahun mencapai rerata Rp. 601.120.000/tahun. Kendala yang disampaikan adalah pengembangan modal dan sarana prasarana produktif pengolahan gula semut.

3. Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kuaao dibuka, rata rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000,- per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000,- per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000,- sampai dengan Rp. 13.200.000,- perbulannya. Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.
4. Studi pendapatan di unit usaha ekowisata kepala banda dan taman pinus wakanda LPHN Taram Kabupaten Limapuluh Kota menunjukkan bahwa pendapatan dari penerimaan restribusi parkir dan tempat wisata mampu mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau rata rata Rp. 20.000.000 per bulan, bahkan dalam waktu libur akhir pekan/liburan pengunjung bisa mencapai 7.000 orang seharinya. Belum lagi pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat dari penjualan makanan, minuman, produk sereh wangi, jamur tiram dan cendera mata.
5. Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di Hkm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar ketua kelompok Hkm penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2½ hingga 6 liter perminggu tergantung jenis lampu yang di pakai bila rata rata 3 liter x 48 KK yang teraliri perminggu menghabiskan 144 liter per minggu atau 576 liter per bulan bila harga BBM di patamuan berkisar Rp. 15.000 maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000, ditambah usaha penyewaan boad rata rata 2 trip per hari x Rp. 800,000 s/d 1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000 s/d Rp. 60.000.000, bila dikurangi biaya operasional per tripnya 600.000 maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 per bulan.
6. Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKM Karya Setia berdasarkan pengakuan ketua kelompok (Desrawardi) Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 8.000.000, perbulan setelah dikurangi biaya produksi.

7. Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pakan Rabaa, Pasir Talang Timur, Paru dan Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan jumlah ternak antara 3 s/d 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 35.000.000 pertahun disamping pemanfaatan kompos dan pupuk anorganik dari kotoran ternak.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok disamping manfaat lain yang jauh lebih besar, usaha usaha lain seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral dan lainnya yang belum dapat diukur peningkatannya juga merupakan tambahan manfaat yang patut diperhitungkan.

Mengingat dampak dan manfaat yang besar maka perlu jaminan bahwa pelayanan pemberdayaan masyarakat akan kelola hutan dan perijinan perhutanan sosial perlu kejelasan dan kepastian tata waktu yang bisa dilaksanakan dalam sebuah standart operasional pelayanan (SOP), untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sesuai aturan dan berkembang sesuai dinamika kebutuhan pelayanan proses maka penting untuk terus mengimplementasikan substansi ISO dalam pelayanan fasilitasnya.



Gambar 17. Survey Karakteristik Petani Hutan Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah melakukan survey pendapatan petani hutan dengan responden wanita mencapai 17% dan pria 83% dimana 14% nya berpendidikan sarjana. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha dominan pada petani hutan adalah produk pertanian (45,5%), silvopastura (28,9%), hasil hutan bukan kayu (19,2%) dan hasil hutan kayu (6,4%). Berdasarkan survey tersebut,

pendapatan rerata per bulan petani hutan adalah Rp. 1.779.710 dimana hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil survey dari Badan Pusat Statistik.

Keberhasilan Pengembangan Kelola masyarakat terhadap Kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 telah menghantarkan Sumatera Barat meraih semua kategori pada lomba dan apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021. Penghargaan tersebut dicapai pada kategori sebagai berikut:

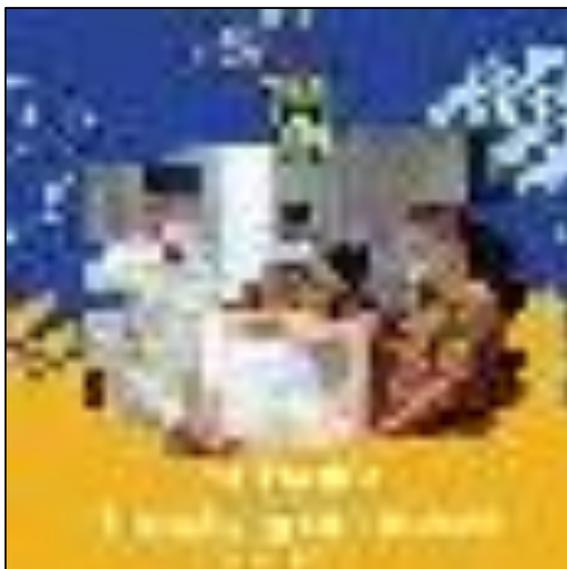
1. LPHN Simarasok sebagai Juara 1 Tingkat Naasional
 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Sdr. Ritno sebagai Terbaik II.
 3. HKM Baringin Sakti sebagai Terbaik II.
 4. Kelompok Pencinta Alam (KPA) Unand sebagai Terbaik II
 5. Kader Konsevasi Alam (KKA) Sdr. Boyke Mardonal sebagai Terbaik III.
 6. Hutan Adat Koto Besar Dharmasraya sebagai Terbaik III.
 7. Penyuluh Kehutanan PNS, Sdri. Reni Rahmayunil sebagai Terbaik III
 8. Kelompok Tani Hutan Konsevasi Mandiri Solok Selatan sebagai Terbaik Harapan
- I.



Gambar 18. Penyerahan Penghargaan Wana Lestari Tahun 2021

Di tingkat provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih terbaik II penghargaan Inovasi Tahun 2021. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Gubernur Sumatera Barat kepada Kepala Dinas Kehutanan sebagai OPD Sangat Inovatif.

Berdasarkan evaluasi inovasi, Dinas Kehutanan memperoleh skor/nilai indeks sebesar 1.661 untuk 15 inovasi yang digagas sejak 2019 sampai dengan 2021.



Gambar 19. Pemberian Penghargaan Inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan namun tidak sampai mempengaruhi capaian indikator kinerja utama karena telah dilakukan mitigasi dan penerapan solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut.

Faktor penyebab kegagalan/permasalahan:

1. Belum optimalnya internalisasi Perhutanan Sosial di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya peningkatan sumber daya yang memadai terkait pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) belum optimal.
4. Belum maksimalnya dukungan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sebagai payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan internalisasi Perhutanan Sosial kedalam seluruh Unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat bersinergi dalam mendorong percepatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Memastikan peningkatan kapasitas unit kerja, sarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaan yang memadai untuk menjamin perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat dapat berkesinambungan.
3. Penting untuk penguatan lembaga/kelompok Perhutanan Sosial agar dapat beroperasi dan memiliki unit usaha yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) mutlak terus di dorong dan diperluas.
4. Perlu regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang memadai dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial.

Dukungan keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan melalui satu program, satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu:

- A. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan:
 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya tercermin dari realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 39.

Tabel 39. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % | | | |
|-----|--|--|--|----------|---|--------|--|---|---|----------|--------|-----|
| 1 | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 1 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | - Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkatkan kapasitas SDM | 75 orang | 75 orang | 100 | |
| | | | | | | | - Jumlah Diklat, Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | | |
| | | | | | | 2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | - | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | | | | | Unit Percontohan Penyuluh | 1 unit | 1 unit | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % | |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|--|--|------------|-----------|-----|
| | | | | | | Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan | | | | |
| | | | | | | - Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan | 8 Kali | 8 Kali | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove | 5 Kali | 5 Kali | 100 | |
| | | | | | | - Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya | 5 Kelompok | 2 Kelompok | 100 | |
| | | | | | 3 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | - Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas | 180 orang | 180 orang | 100 |
| | | | | | | - Jumlah Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial | 20 Kali | 20 Kali | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah kemitraan yang difasilitasi | 4 Unit | 4 Unit | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum | 110 Orang | 110 Orang | 100 | |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 | |

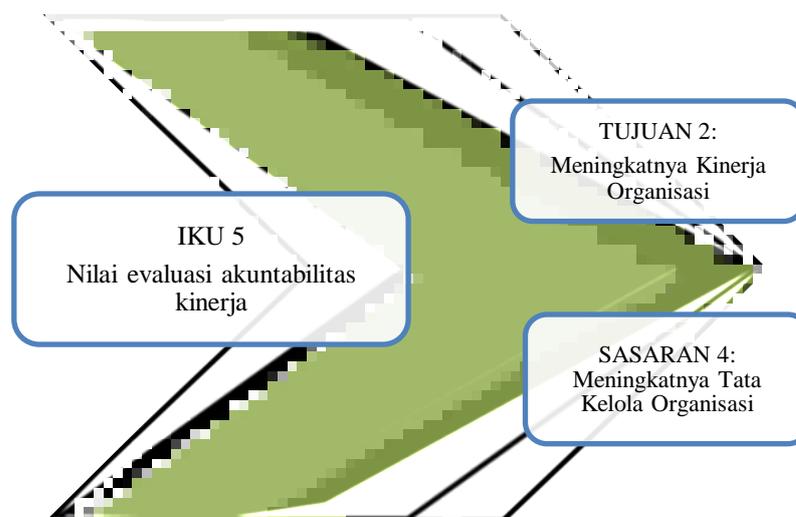
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|---|------------|------------|-----|
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|---|------------|------------|-----|
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 100 |
| | | | | | | - Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan | 15 Kali | 15 Kali | 100 |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|-----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--------------|---|-------------|-------------|-----|
| | | | | | | kegiatan persiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan | | | |
| | | | | | | - Jumlah Pengembangan Sosialisasi dan Dokumentasi Perhutanan Sosial | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | - Jumlah AEP pada wilayah KPH | 20 Unit | 20 Unit | 100 |
| | | | | | | - Operasional Pokja PPS | 11 Kegiatan | 11 Kegiatan | 100 |
| | | | | | | - Fasilitasi Usulan Izin PS | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 100 |
| | | | | | | Tersedianya AEP untuk pengembangan Usaha pada Kelompok | 4 Unit | 4 Unit | 100 |
| | | | | | | Peningkatan KUPS | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 100 |
| | | | | | | Terlatihnya Kelompok PS dalam pengembangan usahanya | 100 orang | 100 orang | 100 |

IV. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 20. Tujuan dan Sasaran Strategis 4.

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2021

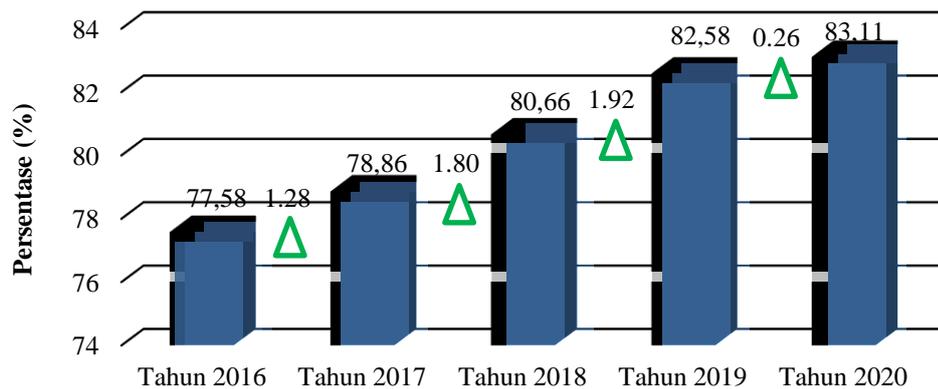
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (80,00) | A (83,11) | 103,89 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) | | | | | 103,89 |

Dari Tabel 40 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2021 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 103,89% atau lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun lalu dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 103,89% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

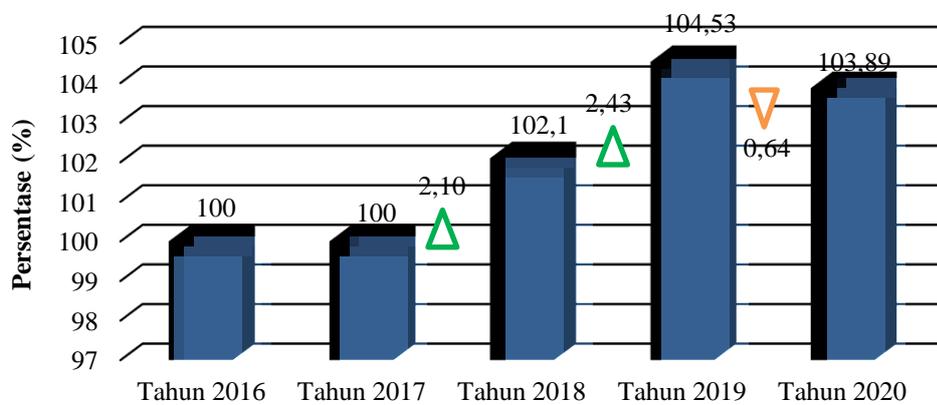
Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2021 | Target 2020 | Tahun 2021 (n) | | Tahun 2020 (n-1) | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | A | 103,89 | A | 104,53 |

Capaian kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2021 lebih rendah 0,64% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2020. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 21 dan 22.



Gambar 21. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2016 s.d Tahun 2020



Gambar 22. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2016 s.d Tahun 2020

Tabel 42. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan (%) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | A | 103,89 |

Tabel 42 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” pada Tahun 2020 telah melebihi capaian indikator kinerja target akhir Renstra yaitu sebesar 103,89%. Atau dapat dikatakan capaian akhir Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir Renstra sebesar 100%.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dan Jambi

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Thn 2019 | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-------|
| | | Sumbar | Riau | Jambi |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | A (83,11) | - | - |

Dari Tabel 43 dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi karena nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak menjadi IKU pada ke dua provinsi tersebut. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja A pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat artinya kinerja pada tahun tersebut sudah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisasi A dengan tingkat capaian 103,89% termasuk kategori memuaskan. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat sekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan bermoral.
7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
9. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
10. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kinerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kinerjanya kurang baik

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagaimana yang telah dilakukan melalui website www.sumbarprov.go.id dan media sosial lainnya.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, Dinas Kehutanan telah melakukan beberapa upaya inovasi antara lain:

1. Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang memuat dokumen-dokumen kepegawaian yang upload pada sistem yang dirancang berbasis pemrograman. Dokumen tersebut dapat dimutakhirkan secara mudah dan cepat dalam sistem dan juga dapat diunduh untuk memenuhi kebutuhan manajemen kepegawaian.
2. Penerapan Sistem Layanan Elektronik Data Tematik Urusan Kehutanan (*Silek Datuak*) untuk menyediakan informasi dan dokumentasi tematik kehutanan secara interaktif.
3. Simulator Manejer untuk Perencanaan Hutan Tingkat Tapak (*Si Macan Hutan*) dirancang untuk pengelola hutan agar pengguna dapat melakukan simulasi-simulasi berbasis komputer untuk menggambarkan sistem sesungguhnya (*real system*) dalam perencanaan.
4. Safari Ramadhan Online merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dalam menyikapi wabah Covid-19 dimana Safari Ramadhan Online diterapkan untuk memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan Tahun 2020 dan 2021.
5. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google form*.

Capaian Target IKU “Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2021 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 44.

Tabel 44. Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | | | | Realisasi | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas | 0% | BB | BB | BB | 0% | 100 | A | 103,89 | A | 103,89 | A | 103,89 |

Capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan terukur dan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

| Tahun | Perencanaan Kinerja (35%) | Pengukuran Kinerja (20%) | Pelaporan (15%) | Evaluasi Kinerja (10%) | Pencapaian Sasaran (20%) | Hasil Evaluasi | Nilai |
|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 2016 | 27,64 | 16,49 | 12,68 | 6,27 | 14,5 | 77,58 | BB |
| 2017 | 28,54 | 18,75 | 12,23 | 6,07 | 13,27 | 78,86 | BB |
| 2018 | 28,54 | 19,41 | 13,21 | 7,84 | 11,66 | 80,66 | A |
| 2019 | 28,54 | 20,80 | 13,21 | 7,96 | 12,06 | 82,58 | A |
| 2020 | 27,74 | 22,15 | 12,94 | 8,21 | 12,06 | 83,11 | A |

Sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB dan Tahun 2018 hingga saat ini memperoleh nilai nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Dalam enam tahun terakhir capaian nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan namun tidak sampai mempengaruhi capaian indikator kinerja utama karena telah dilakukan mitigasi dan penerapan solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut.

Faktor penyebab kegagalan/permasalahan:

1. Sosialisasi kebijakan di bidang akuntabilitas belum optimal di sampaikan ke seluruh unit kerja Dinas Kehutanan.
2. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada unit kerja yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas, memperkuat implementasi Sistem AKIP sekaligus meningkatkan kapabilitas SDM Kehutanan.

Dukungan pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui satu program yang terdiri atas enam kegiatan dan 21 sub kegiatan sebagaimana berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD
7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pendukung sasaran strategis ini capaian kinerjanya sangat baik (100%). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat tercermin dari realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 46.

Tabel 46. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2021

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % | |
|-----|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|------------|-----------|-----|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | a Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 | |
| | | | | | | - Dokumen Renstra dan Renja Dishut yang disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | |
| | | | | | 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Dokumen evaluasi kinerja triwulan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | |
| | | | | | | - Dokumen evaluasi perangkat daerah (LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Tahunan) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | |
| | | | | | 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Gaji dan tunjangan ASN Dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun | 409 Orang | 409 Orang | 100 | |
| | | | | | 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Sistem Informasi, Petugas PPHPK) | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | |
| | | | | | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Laporan keuangan akhir tahun | 1 laporan | 1 laporan | 100 | |
| | | | | | 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD | - Laporan keuangan bulanan dan semesteran | 13 Laporan | 13 Laporan | 100 | |
| | | | | | 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - Gedung | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| | | | | | | | - Honorarium pengelola asset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian asset | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | | - Kendaraan dinas operasional | 12 Unit | 12 Unit | 100 |
| | | | | | 3 Administrasi Kepegawaian | 1 Pengadaan Pakaian Dinas | - Pakaian dinas beserta perlengkapan | 118 Orang | 118 Orang | 100 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % | |
|----|-------------------|-------------------------|---------|----------|--|--------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | waian Perangkat Daerah | | nya yang disediakan | | | | |
| | | | | | | 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - Aparatur Sipil Negara Dishut yang mengikuti BIMTEK | 300 orang | 300 orang | 100 |
| | | | | 4 | Adminis trasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | - Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | | | - Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | | | 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 |
| | | | | | | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | | | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Jumlah surat yang didistribusikan | 3600 Surat | 3600 Surat | 100 |
| | | | | | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Air - Internet - Listrik - Telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 100 100 100 |
| | | | | | | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Honor PTT - Jasa kebersihan kantor - Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan) - Jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program Ramadhan) - Jasa pengamanan kantor - Jasa sopir kantor | 13 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan | 13 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan | 100 100 100 100 100 100 |
| | | | | 6 | Pemeliharaan Barang Milik | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | - Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan | 16 Unit | 16 Unit | 100 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|-------------------------|---------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - dinas / operasional - Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | 16 Unit | 16 Unit | 100 |
| | | | | | 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Gedung kantor yang dipelihara - Rumah dinas / mess yang dipelihara - Rumah dinas/mess yang direhabilitasi | 8 unit 7 Unit 1 Unit | 8 unit 7 Unit 1 Unit | 100 100 100 |
| | | | | | 3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Peralatan gedung kantor yang dipelihara - Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 287 Unit 12 Bulan | 287 Unit 12 Bulan | 100 100 |

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 sebagaimana Tabel 47.

Tabel 47. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <u>48.449.850.535</u> | <u>46.577.109.394</u> | <u>96,13</u> | <u>1.872.741.141</u> |
| a. | Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <u>474.306.600</u> | <u>434.810.500</u> | <u>91,67</u> | <u>39.496.100</u> |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 215.862.600 | 192.561.500 | 89,21 | 23.301.100 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 258.444.000 | 242.249.000 | 93,73 | 16.195.000 |
| b. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <u>39.523.413.075</u> | <u>38.268.645.050</u> | <u>96,83</u> | <u>1.254.768.025</u> |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 38.404.556.432 | 37.278.947.630 | 97,07 | 1.125.608.802 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 990.751.704 | 896.964.320 | 90,53 | 93.787.384 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 115.000.000 | 86.413.300 | 75,14 | 28.586.700 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.104.939 | 6.319.800 | 48,22 | 6.785.139 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| c. | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <u>469.278.000</u> | <u>422.479.917</u> | <u>90,03</u> | <u>46.798.083</u> |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 469.278.000 | 422.479.917 | 90,03 | 46.798.083 |
| d. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <u>800.000.600</u> | <u>735.654.730</u> | <u>91,96</u> | <u>64.345.870</u> |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas Kehutanan Provinsi | 177.000.000 | 166.422.300 | 94,02 | 10.577.700 |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Pasaman Raya | 51.000.000 | 49.810.000 | 97,67 | 1.190.000 |
| 3 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 55.500.000 | 55.500.000 | 100,00 | - |
| 4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Agam Raya | 34.483.900 | 34.483.900 | 100,00 | - |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Bukit Barisan | 94.500.000 | 94.455.900 | 99,95 | 44.100 |
| 6 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Sijunjung | 46.500.000 | 46.500.000 | 100,00 | - |
| 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Solok | 49.500.000 | 49.500.000 | 100,00 | - |
| 8 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 28.500.000 | 28.499.240 | 100,00 | 760 |
| 9 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Dharmasraya | 41.700.000 | 41.699.240 | 100,00 | 760 |
| 10 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Pesisir Selatan | 45.800.000 | 45.800.000 | 100,00 | - |
| 11 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Mentawai | 24.000.000 | 23.298.000 | 97,08 | 702.000 |
| 12 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 151.516.700 | 99.686.150 | 65,79 | 51.830.550 |
| e. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | <u>1.514.934.400</u> | <u>1.387.110.913</u> | <u>91,56</u> | <u>127.823.487</u> |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi | 78.720.000 | 78.447.380 | 99,65 | 272.620 |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya | 6.480.000 | 6.430.000 | 99,23 | 50.000 |
| 4 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Agam Raya | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|----|--|---------------|-------------|--------|------------|
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung | 6.480.000 | 6.479.500 | 99,99 | 500 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Solok | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Dharmasraya | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Mentawai | 6.480.000 | 6.480.000 | 100,00 | - |
| 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 309.387.100 | 278.008.000 | 89,86 | 31.379.100 |
| 14 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kehutanan Provinsi | 226.237.900 | 224.406.295 | 99,19 | 1.831.605 |
| 15 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 25.006.400 | 24.090.700 | 96,34 | 915.700 |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya | 26.120.400 | 25.434.400 | 97,37 | 686.000 |
| 17 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 26.120.400 | 26.120.400 | 100,00 | - |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Agam Raya | 26.120.400 | 23.360.400 | 89,43 | 2.760.000 |
| 19 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan | 23.070.400 | 22.737.300 | 98,56 | 333.100 |
| 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Sijunjung | 26.120.400 | 25.764.000 | 98,64 | 356.400 |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Solok | 22.374.400 | 21.854.400 | 97,68 | 520.000 |
| 22 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 26.120.400 | 24.146.400 | 92,44 | 1.974.000 |
| 23 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHP Dharmasraya | 26.120.400 | 26.100.400 | 99,92 | 20.000 |
| 24 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan | 26.120.400 | 26.120.400 | 100,00 | - |
| 25 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KPHP Mentawai | 18.475.400 | 17.936.400 | 97,08 | 539.000 |
| 26 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 152.694.000 | 150.932.990 | 98,85 | 1.761.010 |
| 27 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 28 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Pasaman Raya | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 29 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 30 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Agam Raya | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 31 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Bukit Barisan | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 32 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Sijunjung | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 33 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Solok | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 34 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 35 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Dharmasraya | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 36 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 37 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Mentawai | 8.846.000 | 8.846.000 | 100,00 | - |
| 38 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 41.700.000 | 41.520.000 | 99,57 | 180.000 |
| 39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 1.440.000 | 1.200.000 | 83,33 | 240.000 |
| 40 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Pasaman Raya | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 41 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 42 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan UPTD KPHL Agam Raya | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 43 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Bukit Barisan | 1.440.000 | 1.320.000 | 91,67 | 120.000 |
| 44 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Sijunjung | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 45 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Solok | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 46 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 47 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Dharmasraya | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 48 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 49 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Mentawai | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 | - |
| 50 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000 | 166.115.548 | 66,45 | 83.884.452 |
| f. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.849.837.469 | 2.558.018.016 | 89,76 | 291.819.453 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 92.085.400 | 80.756.360 | 87,70 | 11.329.040 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 352.739.786 | 296.316.794 | 84,00 | 56.422.992 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|----|---|---------------|-------------|--------|------------|
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 76.434.000 | 62.535.094 | 81,82 | 13.898.906 |
| 4 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya | 18.705.780 | 17.944.603 | 95,93 | 761.177 |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 28.920.000 | 22.715.392 | 78,55 | 6.204.608 |
| 6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya | 14.071.500 | 13.299.436 | 94,51 | 772.064 |
| 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Bukit Barisan | 84.552.000 | 64.562.918 | 76,36 | 19.989.082 |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung | 45.010.950 | 33.561.181 | 74,56 | 11.449.769 |
| 9 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Solok | 32.184.000 | 25.397.967 | 78,91 | 6.786.033 |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 12.360.000 | 9.050.590 | 73,22 | 3.309.410 |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Dharmasraya | 23.763.000 | 13.700.054 | 57,65 | 10.062.946 |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Pesisir Selatan | 18.058.440 | 15.658.847 | 86,71 | 2.399.593 |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Mentawai | 18.126.000 | 15.066.000 | 83,12 | 3.060.000 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kehutanan Provinsi | 591.809.150 | 530.194.464 | 89,59 | 61.614.686 |
| 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 43.187.950 | 38.059.210 | 88,12 | 5.128.740 |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya | 140.534.600 | 125.946.396 | 89,62 | 14.588.204 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 126.444.200 | 126.444.198 | 100,00 | 2 |
| 18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Agam Raya | 121.266.430 | 121.247.674 | 99,98 | 18.756 |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan | 231.281.250 | 200.595.298 | 86,73 | 30.685.952 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Sijunjung | 125.798.375 | 125.747.674 | 99,96 | 50.701 |
| 21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Solok | 122.147.674 | 122.147.672 | 100,00 | 2 |
| 22 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 124.543.697 | 123.490.630 | 99,15 | 1.053.067 |
| 23 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Dharmasraya | 140.534.600 | 126.584.218 | 90,07 | 13.950.382 |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan | 129.244.087 | 125.747.672 | 97,29 | 3.496.415 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 25 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Mentawai | 136.034.600 | 121.247.674 | 89,13 | 14.786.926 |
| g. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <u>2.818.080.391</u> | <u>2.770.390.268</u> | <u>98,31</u> | <u>47.690.123</u> |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 677.013.491 | 676.301.660 | 99,89 | 711.831 |
| 2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi | 1.741.923.300 | 1.730.594.108 | 99,35 | 11.329.192 |
| 3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 10.082.800 | 10.005.000 | 99,23 | 77.800 |
| 4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Pasaman Raya | 28.808.000 | 28.760.000 | 99,83 | 48.000 |
| 5 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 21.606.000 | 21.592.000 | 99,94 | 14.000 |
| 6 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Agam Raya | 10.082.800 | 10.000.000 | 99,18 | 82.800 |
| 7 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Bukit Barisan | 59.056.400 | 59.055.000 | 100,00 | 1.400 |
| 8 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Sijunjung | 36.010.000 | 35.970.000 | 99,89 | 40.000 |
| 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Solok | 28.808.000 | 28.808.000 | 100,00 | - |
| 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 25.106.000 | 25.101.000 | 99,98 | 5.000 |
| 11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Dharmasraya | 38.890.800 | 38.890.700 | 100,00 | 100 |
| 12 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Pesisir Selatan | 23.040.000 | 23.040.000 | 100,00 | - |
| 13 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Mentawai | 10.082.800 | 10.082.800 | 100,00 | - |
| 14 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 107.570.000 | 72.190.000 | 67,11 | 35.380.000 |
| B. | Program Pengelolaan Hutan | <u>20.747.380.387</u> | <u>18.649.430.167</u> | <u>89,89</u> | <u>2.097.950.220</u> |
| a. | Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <u>2.161.097.116</u> | <u>1.597.411.227</u> | <u>73,92</u> | <u>563.685.889</u> |
| 1 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi | 261.063.300 | 171.858.700 | 65,83 | 89.204.600 |
| 2 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya | 101.286.800 | 94.761.400 | 93,56 | 6.525.400 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 84.945.800 | 80.153.477 | 94,36 | 4.792.323 |
| 4 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Agam Raya | 48.827.800 | 46.294.200 | 94,81 | 2.533.600 |
| 5 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan | 119.531.600 | 118.243.600 | 98,92 | 1.288.000 |
| 6 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Sijunjung | 120.239.550 | 114.449.050 | 95,18 | 5.790.500 |
| 7 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Solok | 96.353.800 | 94.995.300 | 98,59 | 1.358.500 |
| 8 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 115.166.800 | 113.651.200 | 98,68 | 1.515.600 |
| 9 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya | 100.481.366 | 98.506.800 | 98,03 | 1.974.566 |
| 10 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 134.103.500 | 118.253.500 | 88,18 | 15.850.000 |
| 11 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Mentawai | 102.363.000 | 102.339.000 | 99,98 | 24.000 |
| 12 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 176.733.800 | 161.404.000 | 91,33 | 15.329.800 |
| 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH | 700.000.000 | 282.501.000 | 40,36 | 417.499.000 |
| b. | Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <u>1.582.376.879</u> | <u>1.307.802.025</u> | <u>82,65</u> | <u>274.574.854</u> |
| 1 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | 136.765.309 | 116.282.550 | 85,02 | 20.482.759 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | 553.777.000 | 398.148.379 | 71,90 | 155.628.621 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Pasaman Raya | 91.760.000 | 90.325.400 | 98,44 | 1.434.600 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Lindung UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 60.102.000 | 59.604.700 | 99,17 | 497.300 |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Agam Raya | 40.482.000 | 35.798.900 | 88,43 | 4.683.100 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Bukit Barisan | 130.000.000 | 127.828.200 | 98,33 | 2.171.800 |
| 7 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Sijunjung | 25.428.000 | 25.353.000 | 99,71 | 75.000 |
| 8 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Solok | 47.280.450 | 47.028.650 | 99,47 | 251.800 |
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 40.000.000 | 38.390.000 | 95,98 | 1.610.000 |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Dharmasraya | 39.700.620 | 39.210.046 | 98,76 | 490.574 |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Pesisir Selatan | 37.281.500 | 37.270.000 | 99,97 | 11.500 |
| 12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Mentawai | 129.800.000 | 113.570.000 | 87,50 | 16.230.000 |
| 13 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | 50.000.000 | 42.057.000 | 84,11 | 7.943.000 |
| 14 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | 200.000.000 | 136.935.200 | 68,47 | 63.064.800 |
| c. | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 8.505.025.110 | 8.172.120.089 | 96,09 | 332.905.021 |
| 1 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 174.305.120 | 137.030.700 | 78,62 | 37.274.420 |
| 2 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 310.044.310 | 274.713.380 | 88,60 | 35.330.930 |
| 3 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Pasaman Raya | 226.410.000 | 225.983.800 | 99,81 | 426.200 |
| 4 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 681.016.200 | 675.861.900 | 99,24 | 5.154.300 |
| 5 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Agam Raya | 734.374.480 | 732.630.200 | 99,76 | 1.744.280 |
| 6 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Bukit Barisan | 1.081.679.400 | 1.002.384.600 | 92,67 | 79.294.800 |
| 7 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Sijunjung | 852.551.200 | 816.901.050 | 95,82 | 35.650.150 |
| 8 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Solok | 1.152.644.000 | 1.138.665.650 | 98,79 | 13.978.350 |
| 9 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 200.000.000 | 199.846.255 | 99,92 | 153.745 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 10 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Pesisir Selatan | 334.000.000 | 313.175.000 | 93,76 | 20.825.000 |
| 11 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 224.743.200 | 216.072.551 | 96,14 | 8.670.649 |
| 12 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan UPTD KPHL Bukit Barisan | 231.026.400 | 225.944.900 | 97,80 | 5.081.500 |
| 13 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan UPTD KPHL Sijunjung | 193.617.600 | 191.398.100 | 98,85 | 2.219.500 |
| 14 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan UPTD KPHL Solok | 374.668.800 | 374.659.900 | 100,00 | 8.900 |
| 15 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan | 1.220.464.000 | 1.176.416.003 | 96,39 | 44.047.997 |
| 16 | Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Provinsi | 352.478.400 | 316.456.100 | 89,78 | 36.022.300 |
| 17 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 44.149.300 | 41.449.300 | 93,88 | 2.700.000 |
| 18 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Agam Raya | 26.329.300 | 24.779.300 | 94,11 | 1.550.000 |
| 19 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Bukit Barisan | 32.524.300 | 29.824.300 | 91,70 | 2.700.000 |
| 20 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Sijunjung | 22.669.300 | 22.597.300 | 99,68 | 72.000 |
| 21 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Solok | 35.329.800 | 35.329.800 | 100,00 | - |
| d. | Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <u>7.583.698.627</u> | <u>6.766.362.906</u> | <u>89,22</u> | <u>817.335.721</u> |
| 1 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | 2.759.382.100 | 2.589.469.892 | 93,84 | 169.912.208 |
| 2 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya | 168.400.000 | 167.786.350 | 99,64 | 613.650 |
| 3 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 134.360.500 | 133.617.100 | 99,45 | 743.400 |
| 4 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Agam Raya | 162.302.145 | 149.190.150 | 91,92 | 13.111.995 |
| 5 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan | 375.000.000 | 370.916.182 | 98,91 | 4.083.818 |
| 6 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Sijunjung | 175.000.000 | 172.793.250 | 98,74 | 2.206.750 |
| 7 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Solok | 170.500.000 | 165.904.600 | 97,30 | 4.595.400 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 8 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 170.041.500 | 169.131.500 | 99,46 | 910.000 |
| 9 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya | 162.532.582 | 162.520.779 | 99,99 | 11.803 |
| 10 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 111.070.000 | 111.060.500 | 99,99 | 9.500 |
| 11 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Mentawai | 151.363.000 | 113.418.000 | 74,93 | 37.945.000 |
| 12 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi | 2.495.000.000 | 1.997.510.268 | 80,06 | 497.489.732 |
| 13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Pasaman Raya | 58.000.000 | 56.804.550 | 97,94 | 1.195.450 |
| 14 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 41.324.600 | 41.324.600 | 100,00 | - |
| 15 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Agam Raya | 47.845.000 | 31.856.400 | 66,58 | 15.988.600 |
| 16 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Bukit Barisan | 90.000.000 | 29.971.300 | 33,30 | 60.028.700 |
| 17 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Sijunjung | 58.000.000 | 57.513.710 | 99,16 | 486.290 |
| 18 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Solok | 58.000.000 | 56.484.500 | 97,39 | 1.515.500 |
| 19 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 57.996.300 | 57.546.300 | 99,22 | 450.000 |
| 20 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Dharmasraya | 44.940.900 | 44.933.975 | 99,98 | 6.925 |
| 21 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 42.250.000 | 42.244.000 | 99,99 | 6.000 |
| 22 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Mentawai | 50.390.000 | 44.365.000 | 88,04 | 6.025.000 |
| e. | Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | 815.182.655 | 716.926.020 | 87,95 | 98.256.635 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya Dinas Kehutanan Provinsi | 357.526.000 | 281.734.300 | 78,80 | 75.791.700 |
| 2 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Pasaman | 48.823.000 | 46.394.000 | 95,02 | 2.429.000 |
| 3 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 32.717.000 | 32.604.700 | 99,66 | 112.300 |
| 4 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Agam Raya | 43.493.000 | 42.018.620 | 96,61 | 1.474.380 |
| 5 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Bukit Barisan | 44.321.000 | 44.179.000 | 99,68 | 142.000 |
| 6 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Sijunjung | 42.989.500 | 42.348.500 | 98,51 | 641.000 |
| 7 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Solok | 39.666.900 | 39.666.900 | 100,00 | - |
| 8 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 41.645.000 | 36.435.000 | 87,49 | 5.210.000 |
| 9 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Dharmasraya | 39.731.255 | 39.610.000 | 99,69 | 121.255 |
| 10 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Pesisir Selatan | 41.645.000 | 41.645.000 | 100,00 | - |
| 11 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Mentawai | 82.625.000 | 70.290.000 | 85,07 | 12.335.000 |
| f. | Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan | 100.000.000 | 88.807.900 | 88,81 | 11.192.100 |
| 1 | Sertifikasi Mutu Bibit | 50.000.000 | 39.447.000 | 78,89 | 10.553.000 |
| 2 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 50.000.000 | 49.360.900 | 98,72 | 639.100 |
| C. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 439.274.500 | 384.365.000 | 87,50 | 54.909.500 |
| a. | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 439.274.500 | 384.365.000 | 87,50 | 54.909.500 |
| 1 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Luar Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi | 239.274.500 | 184.607.000 | 77,15 | 54.667.500 |
| 2 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi UPTD KPHL Bukit Barisan | 200.000.000 | 199.758.000 | 99,88 | 242.000 |
| D. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 8.540.553.387 | 7.899.528.631 | 92,49 | 641.024.756 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| a. | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <u>8.540.553.387</u> | <u>7.899.528.631</u> | <u>92,49</u> | <u>641.024.756</u> |
| 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 493.945.460 | 441.948.080 | 89,47 | 51.997.380 |
| 2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 810.442.000 | 685.113.650 | 84,54 | 125.328.350 |
| 3 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya | 103.875.200 | 101.805.200 | 98,01 | 2.070.000 |
| 4 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 76.678.000 | 76.653.100 | 99,97 | 24.900 |
| 5 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Agam Raya | 88.636.600 | 81.709.200 | 92,18 | 6.927.400 |
| 6 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan | 83.700.000 | 80.043.790 | 95,63 | 3.656.210 |
| 7 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Sijunjung | 90.000.000 | 88.952.000 | 98,84 | 1.048.000 |
| 8 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Solok | 87.819.750 | 86.960.150 | 99,02 | 859.600 |
| 9 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 82.358.000 | 82.223.000 | 99,84 | 135.000 |
| 10 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Dharmasraya | 88.492.100 | 86.689.850 | 97,96 | 1.802.250 |
| 11 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan | 25.650.000 | 25.647.500 | 99,99 | 2.500 |
| 12 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHP Mentawai | 55.252.000 | 37.132.000 | 67,20 | 18.120.000 |
| 13 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi | 2.525.347.833 | 2.150.886.139 | 85,17 | 374.461.694 |
| 14 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Pasaman Raya | 880.572.000 | 874.662.800 | 99,33 | 5.909.200 |
| 15 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Lima Puluh Kota | 387.754.700 | 387.314.750 | 99,89 | 439.950 |
| 16 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Agam Raya | 547.847.600 | 539.153.000 | 98,41 | 8.694.600 |
| 17 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Bukit Barisan | 440.407.000 | 433.335.322 | 98,39 | 7.071.678 |
| 18 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Sijunjung | 680.470.000 | 661.428.250 | 97,20 | 19.041.750 |
| 19 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Solok | 285.688.000 | 278.289.410 | 97,41 | 7.398.590 |
| 20 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Hulu Batang Hari | 171.571.300 | 170.807.500 | 99,55 | 763.800 |

| NO | REKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 21 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Dharmasraya | 275.161.844 | 274.143.830 | 99,63 | 1.018.014 |
| 22 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Pesisir Selatan | 258.884.000 | 254.630.110 | 98,36 | 4.253.890 |
| | | | | | |
| E. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 480.499.000 | 429.558.100 | 89,40 | 50.940.900 |
| a. | Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah | 480.499.000 | 429.558.100 | 89,40 | 50.940.900 |
| 1 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | 480.499.000 | 429.558.100 | 89,40 | 50.940.900 |
| | JUMLAH | 78.657.557.809 | 73.939.991.292 | 94,00 | 4.717.566.517 |

Anggaran Belanja Tahun 2021 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DBH-DR dan DAK yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 39.395.271.432 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 39.262.286.387 pada anggaran perubahan yang terdiri atas:

- Anggaran APBD Murni sebesar Rp. 23.534.283.647,- dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Rp. 1.734.717.260,-
- Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp.9.108.347.000,-
- Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.167.416.000,-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp 73.939.991.292,- atau 94,00% terhadap alokasi anggaran Tahun 2021 Rp. 78.657.557.809,-. Artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.717.566.517,- atau lebih tinggi dari sisa anggaran tahun lalu yang mencapai Rp. 955.328.625,-. Sisa anggaran sebesar Rp 4.717.566.517,- tersebut sebagian besar merupakan sisa mati dan hasil efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sub kegiatan.

Merujuk pada Tabel 47 di atas, capaian kinerja keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berlangsung selama Tahun Anggaran 2021 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program:

- Program dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 2 program (rata-rata 94.31%).
- Program dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80% - 90%) sebanyak 3 program (rata-rata 88.93%).

- Program dengan kategori sedang (capaian kinerja 60% - 80%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori gagal (capaian kinerja 0% -60%) sebanyak 0 program

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan :

- Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 kegiatan
- Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 8 kegiatan (rata-rata 93.62%)
- Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 7 kegiatan (rata-rata 87.90%)
- Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60% -80%) sebanyak 1 kegiatan (rata-rata 73.92%).
- Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 0 kegiatan

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 50 kegiatan (rata-rata 100%)
- Sub Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 114 kegiatan (rata-rata 97.65%)
- Sub Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 29 kegiatan (rata-rata 86.87%)
- Sub Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 19 kegiatan (rata-rata 72.87%).
- Sub Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 4 kegiatan (rata-rata 44.48%)

Kinerja program dan kegiatan tersebut diiringi dengan Efisiensi dan efektifnya pencapaian target pada ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 114,86% atau lebih tinggi 7,63% dari tahun sebelumnya, dengan kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp 4.732961.770,-, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp. 3.759.169.972,- atau 79,43% dengan sisa anggaran Rp. 973.791.798,- (20,57%). Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 ini secara keseluruhan 98,15%, dimana pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH yang hanya mencapai 44,44%.
2. Menurunnya Laju Kerusakan Hutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 16.934.192.117,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 15.704.183.295,- atau 92,74% dengan sisa anggaran Rp. 1.230.000.822,- (7,26%). Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 ini secara keseluruhan mencapai 99,55%.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp 8.540.553.387,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 3 adalah sebesar Rp 7.899.528.631,- atau 92,49 % dengan sisa anggaran Rp. 641.024.756,- (7,51%). Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 ini secara keseluruhan 100%.

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp 48.449.850.535,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 4 adalah sebesar Rp 46.557.109.394,- atau 96,13% dengan sisa anggaran Rp. 1.872.741.141,- (3,87%). Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 ini secara keseluruhan 100%.

Realisasi seluruh sub kegiatan yang mendukung pencapaian empat sasaran strategis di atas pada umumnya sudah di atas 60%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 60% (kategori gagal) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Dharmasraya, dari anggaran Rp. 23.763.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.700.054,- (57,65%), dengan realisasi fisik 100%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 60% disebabkan karena terdapat sisa belanja telepon, belanja air, belanja listrik maupun belanja kawat/faksimili/internet/VPN yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dana sebesar Rp 13.104.939,- terealisasi Rp 6.319.800,- atau 48,22% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp.6.785.139,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rekonsiliasi keuangan akhir tahun ke luar kota yang tidak dilaksanakan.

3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- terealisasi Rp. 282.501.000,- (40,36%) dengan realisasi fisik sebesar 44,44%. Rendahnya capaian ini disebabkan adanya sisa anggaran sumber dana DBH-DR untuk pengadaan laptop pendukung pemetaan drone pada KPH yang sampai dengan akhir tahun tidak terdapat spesifikasi yang sesuai pada e-katalog, sehingga diputuskan untuk tidak dilaksanakan pengadaannya mengingat laptop untuk pemetaan drone membutuhkan spesifikasi khusus.
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi Rp. 29.971.300,- (33,30%) dengan realisasi fisik 76,00%. Rendahnya capaian ini disebabkan bahwa sub kegiatan ini merupakan kegiatan situasional yang tergantung terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dimana penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan juga tergantung kepada kejadian kebakaran. Volume kejadian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah KPHL Bukit barisan pada Tahun 2021 kecil sehingga personil yang diturunkan untuk biaya perjalanan dinas menjadi berkurang. Dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan ini bersifat situasional dan kegiatannya dapat direalisasikan sesuai dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Empat sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 60% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Dinas Kehutanan Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2021 terlihat realisasi keuangan pada instansi mencapai 94,00% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 114,86% atau tergolong dalam kriteria **Sangat Baik**.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja tahun 2021 merupakan dasar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai yang diamanatkan, atas dasar tersebut maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- Perjanjian Kinerja (PK) disusun berorientasi hasil dan dapat diukur mencakup kondisi yang ingin diwujudkan yang merupakan *Output* penting terkait isu strategis organisasi berdasarkan basis data yang memadai dan argumen yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan
- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai hasil evaluasi SOP yang dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan auditor eksternal.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali, dengan SOP dan aplikasi/IT yang memudahkan dalam menelusuri sumber data yang valid, kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan, dan adanya kepastian waktu.

3. Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.
- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program Anggaran sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.
- Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.
- Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu dan telah dipublikasikan.

4. Evaluasi Kinerja

- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, audit internal, tinjauan manajemen, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan *reward* dan *punishment* terkait kinerja setiap unit kerja.

5. Capaian Sasaran/Kinerja

Pada Lomba dan apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021, Dinas Kehutanan melalui kelompok individu binaan telah memperoleh semua kategori dalam lomba Wana Lestari tahun 2021 tersebut. Selain hal tersebut Dinas Kehutanan telah mengembangkan Inovasi dan meraih terbaik II penghargaan Inovasi Tahun 2021 dengan Skor 1.661 untuk 15 Inovasi. Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun mendatang.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2021 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seluruh kendala dan hambatan dapat diminimalisir sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum **Sangat Baik** memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 48.

Tabel 48. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| SASARAN | JUMLAH IKU | CAPAIAN SASARAN (%) |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| <i>Sasaran 1</i> | <i>2</i> | <i>105,46</i> |
| <i>Sasaran 2</i> | <i>1</i> | <i>131,67</i> |
| <i>Sasaran 3</i> | <i>1</i> | <i>118,43</i> |
| <i>Sasaran 4</i> | <i>1</i> | <i>103,89</i> |
| <i>Rata-rata</i> | <i>5</i> | <i>114,86</i> |

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memperhitungkan proyeksi cuaca dan peta rawan kebakaran, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya.
2. Masih adanya konflik tenurial kawasan hutan serta masih adanya tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan yang dapat meningkatkan laju kerusakan hutan.
3. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kejahatan kehutanan (perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan).
4. Belum efektif dan optimalnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok perhutanan sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan perhutanan sosial dengan lembaga/instansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta).

Langkah-langkah/alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Penggunaan teknologi, pemantauan prediksi cuaca serta penyusunan peta rawan kebakaran digunakan sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan di Kabupaten/Kota serta peningkatan peran, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kejahatan bidang kehutanan.
3. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi serta dapat memberikan data/informasi kepada *stakeholders* yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga usaha “mengurus hutan dengan hati” dapat mewujudkan “hutan lestari dan masyarakat sejahtera”.